

**FAKTOR-FAKTOR FINANSIAL YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
DI JAWA TIMUR**



TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Manajemen (MM)
Pada Program Pasca Sarjana
Program Studi Magister Manajemen
Universitas Jember

Asal : <u>Nadiah</u>	TS 658.15 EST R e.1
Pembelian : <u>Pembelian</u>	
Perine Tad: <u>14 OCT 2002</u>	
No. induk : <u>SRS.</u>	

Oleh :

ANDI ESTETIONO

NIM : 000820101044

**UNIVERSITAS JEMBER PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**

2002

Lembar Penegasan :

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 25 Agustus 2002

Oleh :

Pembimbing Ketua,



Kamarul Imam, SE, M.Sc.

NIP. 130.935.418

Pembimbing,



Hari Sukarno, SE.MM.

Nip.131.759.761

Mengetahui/Menyetujui,

PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS JEMBER

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

Ketua Program Studi,



Prof. Dr. H. Harijono SU, Ec.

NIP. 130.350.765

JUDUL TESIS

FAKTOR-FAKTOR FINANSIAL YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI JAWA TIMUR

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ANDI ESTETIONO
NIM : 000820101044
Program Studi : MANAJEMEN
Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

02 SEPTEMBER 2002

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Jember.

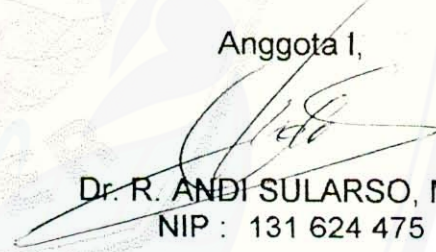
Susunan Panitia Penguji

Ketua,



Prof. Dr. H. HARIJONO, SU.Ec.
NIP : 130 350 765

Anggota I,



Dr. R. ANDI SULARSO, MSM
NIP : 131 624 475

Anggota II,



Drs. KAMARUL IMAM, MSc.
NIP : 130 935 418



Mengetahui/menyetujui
Universitas Jember Program Pascasarjana
Program Studi Magister Manajemen
Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. Harijono, SU.Ec.
NIP : 130 350 765

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat **Allah S.W.T.** atas berkat dan rahmat-Nya akhirnya penelitian dan penulisan tesis ini, dapat diselesaikan tepat waktunya. Tak lupa kami sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi **Muhammad S.A.W.** dan keluarganya serta pengikutnya yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dimuka bumi ini.

Penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini, banyak dibantu oleh berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau di bawah ini.

Pembimbing tesis, kepada beliau Bapak **Kamarul Imam SE.M.Sc.** dan Bapak **Hari Sukarno , SE.MM.** yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Rektor Universitas Jember, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program magister.

Direktur Program Magister Manajemen Universitas Jember beserta Staff, yang telah membantu penulis selama mengikuti pendidikan program magister.

Seluruh Staff Pengajar pada Program Magister Manajemen Universitas Jember, yang ikhlas menuangkan segala ilmu pengetahuan yang mereka miliki kepada penulis sebagai bekal peningkatan pengetahuan kelak.

Pimpinan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti pendidikan program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Secara khusus kepada Istri tercinta **Yunni Rosyida SE.** dan kedua putra-putri kami yang tercinta, **Andi Muhammad Hasan Estetiono** dan **Andi Aisyah Nurkhalishah Estetiono** yang setia selalu menemani dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Universitas Jember.

Seluruh teman-teman, di kantor, di kampus, dan di mana pun berada, yang tidak sempat kami sebut satu persatu, yang telah banyak membantu dalam upaya penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, semoga tesis ini dapat berguna serta bermanfaat bagi mereka yang berkepentingan.

Jember, Agustus 2002

Penulis

RINGKASAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor finansial yang mempengaruhi tingkat kesehatan (TKS) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Timur dan menentukan faktor finansial yang dominan pengaruhnya. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu yang diperoleh dari BPR di Jawa Timur, Bank Indonesia di Jawa Timur, PT. Permodalan Nasional Madani (*Persero*) Surabaya. Jumlah BPR yang ada di Jawa Timur adalah 430, dan tersebar di 37 kabupaten. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 BPR, dan menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara random sederhana.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor finansial yang mempengaruhi TKS BPR di Jawa Timur. Pembuktian hipotesis menggunakan uji statistik regresi secara simultan (Uji F) dan uji regresi parsial (Uji t), dan uji kesamaan dua koefisien regresi (t-test).

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa, dari 7 (tujuh) variabel bebas berupa faktor-faktor finansial yang diteliti, terbukti ada 3 (tiga) faktor finansial yang berpengaruh secara bermakna terhadap variansi perubahan TKS BPR di Jawa Timur. Kualitas aktiva produktif (KAP), Biaya operasional dibagi Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)* secara bersama-sama mempengaruhi TKS BPR di Jawa Timur secara bermakna dengan tingkat kontribusi sebesar 51,9 %, di mana faktor finansial berupa KAP mempunyai pengaruh paling dominan. KAP memiliki pengaruh secara negatif yang sangat bermakna terhadap variansi perubahan TKS BPR di Jawa Timur, terbukti bahwa perubahan TKS BPR sebesar 1 % dipengaruhi oleh perubahan KAP secara berlawanan dengan kontribusi sebesar 0,59 %. BOPO juga memiliki pengaruh secara negatif yang cukup bermakna terhadap variansi perubahan TKS BPR di Jawa Timur, dimana perubahan TKS BPR sebesar 1 % dipengaruhi oleh perubahan BOPO secara berlawanan dengan kontribusi sebesar 0,25 %. Demikian juga halnya dengan *LDR* yang memiliki pengaruh negatif dan bermakna terhadap variansi perubahan TKS BPR di Jawa Timur, adanya perubahan TKS BPR sebesar 1 % dipengaruhi oleh perubahan *LDR* secara berlawanan dengan kontribusi sebesar 0.16 %. Sehingga faktor-faktor finansial berupa KAP, BOPO, dan *LDR* terbukti berpengaruh secara bermakna terhadap variansi perubahan TKS BPR di Jawa Timur. KAP yang paling dominan mempengaruhi TKS BPR. Oleh karena itu Manajemen BPR di Jawa Timur harus memberi perhatian yang besar terhadap KAP.

ABSTRACT

This research is aimed to know financial factors influencing the health (TKS) of rural bank (BPR) in East Java and to decide where it is dominant. The research is using the secondary data that is gathered from the rural bank in East Java, Indonesian Bank of Surabaya, PT. Permodalan Nasional Madani (*Persero*) Surabaya. The population of rural bank in East Java are 430, they are located in 37 regencies. The sample of rural bank in this research are 50, and performed the technical of sampling is the simple random sampling.

Model of analysis that used in this research is the Multiple Regression Linier, that is to know financial factors influencing of the rural bank performance in East Java. Hypotesis is answered by using statistical regression test either simultaneously (F-test) or partially (t-test).

Result in the analysis shows that, from 7 (seven) of financial factors in this research, there are 3 (three) of financial factors show significant influence against the health of rural bank in East Java. The quality of earning asset (KAP), the operational cost to operational income ratio (BOPO), and the loan to deposit ratio (LDR) have significant negative influence simultaneously against the health of rural bank in East Java with level of contribution is 51,9 %, where is the quality of earning asset (KAP) is dominant. The quality of earning asset (KAP) have significant strong negative effect against the health of rural bank in East Java, shows that the change of the health 1 % is influenced contrary from the change of the quality of earning asset (KAP) 0,59 %. The operational cost to operational income ratio (BOPO) have enough significant negative influence against the health of rural bank in East Java, shows that the change of the health of rural bank 1 % is influenced contrary from the change of BOPO 0,25 %. In such a case, the loan to deposit ratio (LDR) have significant negative influence against the health of rural bank in East Java, shows that the change of the health 1 % is influenced contrary from the change of LDR 0,16 %. So that, this research shows that the financial factors KAP (quality of earning asset), BOPO (operational cost to operational income ratio), and LDR (loan to deposit ratio) have a significant effect to predict the variance of change of the health of rural bank in East Java. The quality of earning asset (KAP) is dominant to predict the variance of change of the health of rural bank in East Java. Therefore, the management of BPR in East Java have to take great concern for the quality of earning asset (KAP).

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
RINGKASAN	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Penelitian Operasional	7
1.4.2 Manfaat Penelitian Akademis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Tingkat Kesehatan Bank	9
2.1.2 Perbankan, Bank, dan BPR	11
2.1.3 Ciri-Ciri Khusus Industri Perbankan	12
2.1.4 Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan	12
1) <i>Accrual Basis</i> Dalam Pencatatan Biaya	13
2) <i>Cash Basis</i> Dalam Pencatatan Pendapatan	13
2.1.5 Laporan Kepada Bank Sentral	13
a) Laporan Mingguan	14
b) Laporan Bulanan	14

c) Laporan Triwulanan	14
d) Laporan Tahunan	14
2.1.6 Laporan Keuangan Bank-Bank Di Indonesia	17
2.1.7 Faktor CAMEL (<i>Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity</i>)	17
1) Permodalan (<i>Capital</i>)	20
a) Pengertian Modal bank	21
b) Modal Inti	21
c) Modal Pelengkap	22
d) Bobot Risiko Aktiva Neraca	24
e) Bobot Risiko Aktiva Administrasi	25
f) Cara Perhitungan Kebutuhan Modal	28
2) Kualitas Aktiva Produktif (<i>Assets</i>)	28
a) Kriteria Penggolongan Kolektibilitas Kredit	30
b) Pembentukan Cadangan Aktiva Yang Diklasifikasikan	34
3) Manajemen (<i>Management</i>)	34
4) Rentabilitas (<i>Earning</i>)	35
5) Likuiditas (<i>Liquidity</i>)	35
2.2 Penelitian Sebelumnya	35
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	38
3.1 Kerangka Konseptual Penelitian	38
3.2 Hipotesis	40
BAB IV METODE PENELITIAN	41
4.1 Obyek Penelitian	41
4.2 Populasi dan Sampel	41
4.3 Identifikasi Variabel	42
4.4 Definisi Operasional Variabel	45
4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	47
4.6 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data	47
4.7 Alat atau Instrumen Penelitian	48
4.8 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis	48
4.8.1 Teknik Analisis Data	48
4.8.2 Uji Hipotesis	49
4.8.3 Uji Asumsi-Asumsi Klasik	51
BAB V HASIL PENELITIAN, ANALISIS DAN PEMBAHASAN	54
5.1 Hasil Penelitian dan Analisis	54
5.2 Hasil Estimasi Regresi	60
5.2.1 Uji Normalitas Data	60
5.2.2 Uji Auto Korelasi	62
5.2.3 Uji Heteroskedastis	62
5.2.4 Uji Multikolinieritas	63

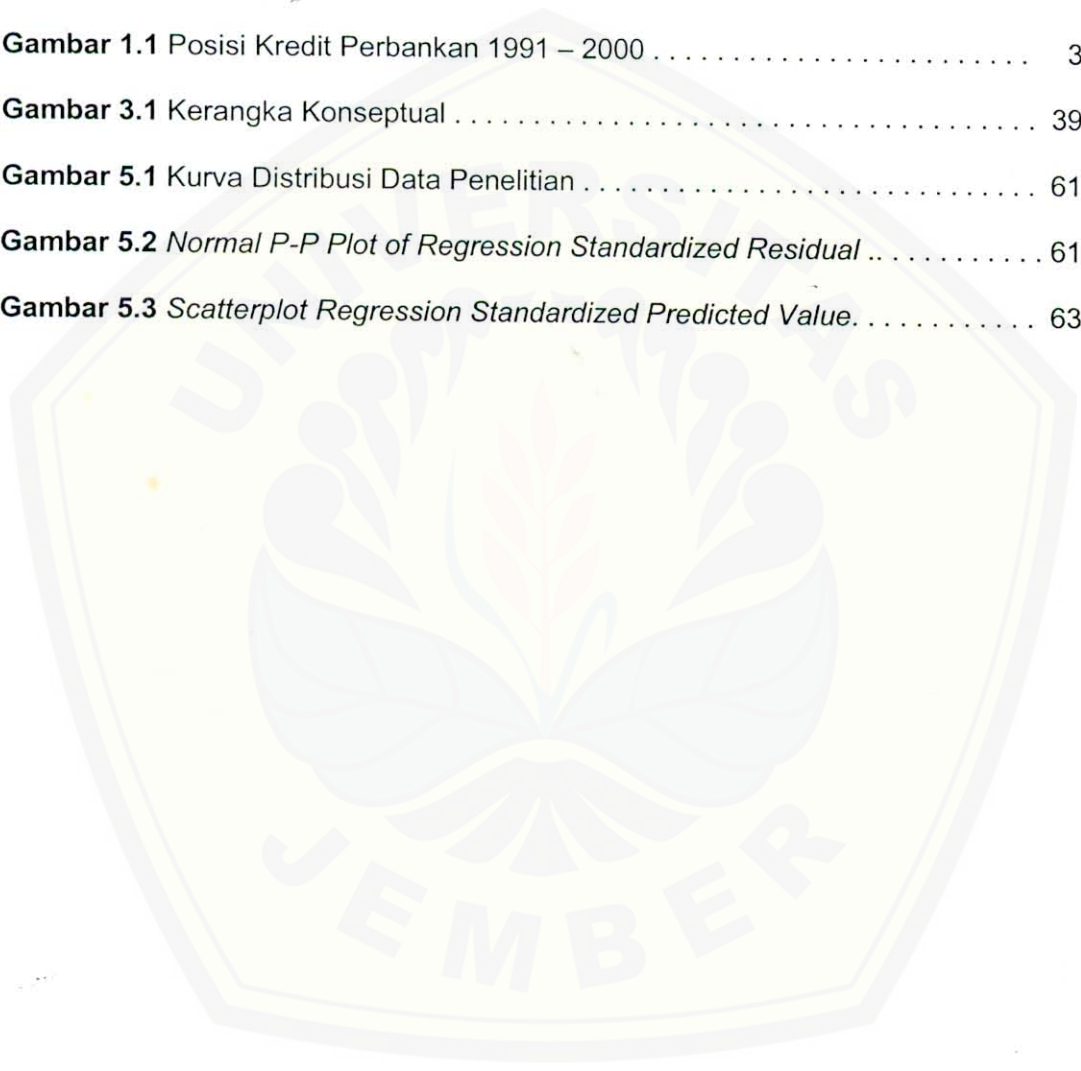
5.2.5 Hasil Estimasi Regresi (Stepwise)	65
5.3 Hasil Uji Hipotesis	66
5.3.1 Uji Hipotesis Pertama	66
5.3.2 Uji Hipotesis Kedua	66
5.4 Pembahasan	68
5.4.1 Hipotesis Pertama	68
5.4.2 Variabel X2 (KAP)	69
5.4.3 Variabel X5 (BOPO)	70
5.4.4 Variabel X6 (LDR)	71
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	74
6.1 Kesimpulan	74
6.1.1 Sesuai Tujuan Satu Penelitian	74
6.1.2 Sesuai Tujuan Kedua Penelitian	75
6.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Nilai Tingkat Kesehatan Bank	11
Tabel 2.2	Format Neraca Perbankan di Indonesia	16
Tabel 2.3	Format Perhitungan Laba/Rugi Perbankan di Indonesia	17
Tabel 2.4	Faktor dan Komponen Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Beserta Bobotnya	20
Tabel 4.1	Daftar Bank Perkreditan Rakyat Yang Dijadikan Obyek Penelitian Berdasarkan Wilayah Kerja BI atau Karesidenan di Jawa Timur	43
Tabel 4.2	Nilai Variabel Terikat (TKS)	45
Tabel 5.1	Rerata CAR BPR Sampel Penelitian Tahun 1999-2001	54
Tabel 5.2	Rerata KAP BPR Sampel Penelitian Tahun 1999-2001	55
Tabel 5.3	Rerata PPAP/PPAPWD BPR Sampel Penelitian Tahun 1999-2001	56
Tabel 5.4	Rerata ROA BPR Sampel Penelitian Tahun 1999-2001	57
Tabel 5.5	Rerata BOPO BPR Sampel Penelitian Tahun 1999-2001	57
Tabel 5.6	Rerata LDR BPR Sampel Penelitian Tahun 1999-2001	58
Tabel 5.7	Rerata QR BPR Sampel Penelitian Tahun 1999-2001	59
Tabel 5.8	Rerata TKS BPR Sampel Penelitian Tahun 1999-2001	60
Tabel 5.9	Nilai VIF dan Tolerance Variabel Bebas	64
Tabel 5.10	Nilai Independent Coefficient Correlation Variabel Bebas	64
Tabel 5.11	Nilai VIF dan Tolerance Setelah Stepwise	65
Tabel 5.12	F Hitung, F Tabel, dan Signifikansi F	66
Tabel 5.13	t hitung dan T Tabel (two-tail)	67
Tabel 5.14	t hitung Uji Kesamaan Dua Koefisien dan t Tabel	67

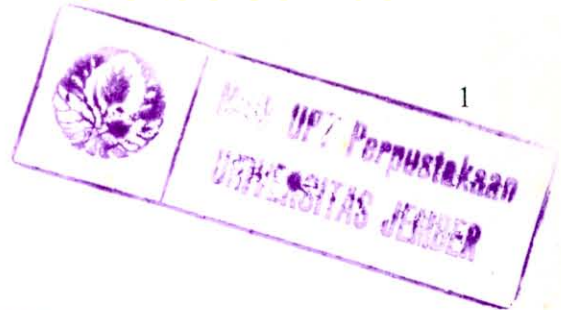
DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Posisi Kredit Perbankan 1991 – 2000	3
Gambar 3.1	Kerangka Konseptual	39
Gambar 5.1	Kurva Distribusi Data Penelitian	61
Gambar 5.2	<i>Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual</i>	61
Gambar 5.3	<i>Scatterplot Regression Standardized Predicted Value.</i>	63



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Nama Lampiran	Halaman
1.	Tabulasi Data TKS BPR Sampel di Jawa Timur	1
2.	Tabulasi Data KAP BPR Sampel di Jawa Timur	2
3.	Tabulasi Data CAR BPR Sampel di Jawa Timur	3
4.	Tabulasi Data PPAP/PPAPWD BPR Sampel di Jawa Timur	4
5.	Tabulasi Data ROA BPR Sampel di Jawa Timur	5
6.	Tabulasi Data BOPO BPR Sampel di Jawa Timur	6
7.	Tabulasi Data QR BPR Sampel di Jawa Timur	7
8.	Tabulasi Data LDR BPR Sampel di Jawa Timur	8
9.	Tabulasi Data Gabungan BPR Sampel di Jawa Timur	9
10.	Regresi Metode Enter	10
13.	Uji Normalitas Data	13
13.	Uji Heteroskedastis	13
14.	Regresi Metode Stepwise	14
18.	Uji Kesamaan Dua Koefisien Regresi	18



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar bebas ASEAN atau *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang akan diberlakukan satu tahun lagi atau tepatnya pada tahun 2003, akan membawa negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia memasuki era baru pasar bebas, yaitu era globalisasi perekonomian dan liberalisasi perdagangan ASEAN. Kondisi ini membawa konsekuensi bagi semua pengusaha nasional baik pengusaha besar, menengah, maupun kecil yang berada di semua sektor perekonomian akan mengalami persaingan yang semakin ketat, baik itu di pasar domestik maupun di pasar internasional.

Sektor riil akan dapat bergerak lebih baik bila didukung oleh sektor moneter yang efisien dan sehat, khususnya sektor perbankan, karena perbankan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Paling tidak, dengan berfungsinya intermediasi perbankan dengan baik akan memacu pertumbuhan unit-unit usaha di suatu negara. Yang akhirnya perusahaan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan.

Perekonomian yang sehat tergantung pada efisiensi pasar keuangan, yaitu pengalihan dana secara efisien dari para penabung kepada mereka yang membutuhkan tambahan modal. Tanpa mengalihkan dana secara efisien, perekonomian akan berjalan tersendat-sendat; pembangunan pabrik baru akan terlambat, ekspansi dan diversifikasi usaha akan terganggu, pembelian barang kebutuhan dengan nilai besar, seperti perumahan mungkin tidak akan pernah terwujud bagi mereka yang tidak mempunyai dana yang cukup, dan sebagainya (*Weston, and Brigham, 1990, 73*).

Pada akhir bulan Juli 1997, perbankan nasional adalah sektor yang mengalami krisis berat akibat gejolak nilai tukar. Sehingga berdampak menurunnya kepercayaan masyarakat serta memburuknya kondisi sosial, politik, dan perekonomian bangsa Indonesia. Realita tersebut semakin menyulitkan bangsa

Indonesia dalam menyongsong pasar bebas ASEAN yang telah berada di depan mata.

Pada tahun 2001, perbankan nasional masih dihadapkan pada banyak kendala, seperti belum berjalannya fungsi intermediasi bank, ancaman *negative spread*, lemahnya kemampuan dalam menyalurkan kredit, atau profesionalisme pengelolaan bank yang dinilai masih banyak kekurangan. Dengan kondisi seperti itu, tidaklah mengherankan bila dalam waktu dekat ini pemerintah segera membentuk peta baru perbankan nasional, atau disebut dengan *landscape* perbankan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan bank kepada *khittah*-nya, yaitu sebagai lembaga intermediasi, penggerak sektor riil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah krisis, bank dituding lebih banyak menjalankan operasinya dengan 'beternak uang' ketimbang memberikan kredit kepada masyarakat. Padahal peran perbankan sangat dibutuhkan untuk menggerakkan sektor riil, khususnya untuk memulihkan perekonomian nasional.

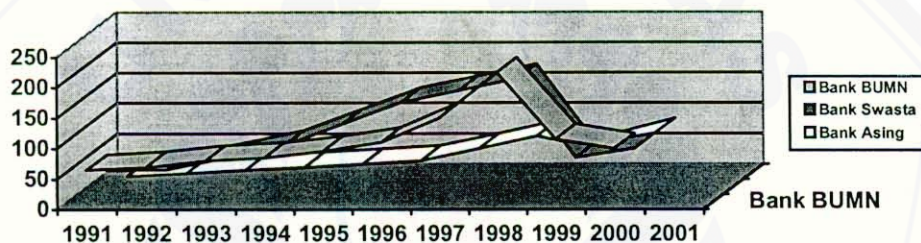
Terngganggunya fungsi intermediasi perbankan nampak jelas dari data-data yang ada, bahwa sejak tiga tahun yang lalu penyaluran kredit baru sekitar Rp. 20 triliun, dan berdasarkan data keuangan per September 2000, *outstanding* kredit bank-bank peserta rekapitalisasi rata-rata tidak lebih dari Rp. 6 triliun (Bisnis Indonesia, Februari 2001). BCA (Bank Central Asia) sebagai bank swasta terbesar yang memiliki total asset Rp. 88 triliun, ternyata hanya memiliki kredit Rp. 6 triliun (Bisnis Indonesia, Februari 2001), atau LDR (*Loan to Deposit Ratio*)-nya hanya sekitar 6,8 %, demikian juga halnya dengan bank-bank besar nasional lainnya, yang rata-rata memiliki LDR di bawah 30 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 1, posisi kredit perbankan 1991-2000. Fakta grafik 1 menunjukkan ada pergeseran fungsi bank sebelum dan sesudah krisis. Bank-bank swasta yang semula bertindak sebagai 'direktur keuangan' kelompok usahanya (konglomerasi). Kini harus mengubah fungsinya menjadi bank yang sebenarnya dan bersaing dengan bank-bank lainnya pada segmen yang juga tidak berbeda.

Peran bank-bank asing maupun campuran disisi lain semakin menonjol. Di saat yang sama, Citibank tercatat memiliki kredit sebesar Rp. 10 triliun dan HSBC

sebesar Rp. 7 triliun. Sehingga masih relevan apa yang telah ditulis oleh George H. Hempel, (Hempel, *et all*, 1986, 3), sebagai berikut;

“Management of a commercial bank has become increasingly challenging task. Concepts and techniques gainfully used only a few years ago now seem outdated. Protecting from regulation and geographic and product constrain appears to be rapidly disappearing. To some managers the increasing complexity of banking decisions is worrisome, yet others this increasing challenge presents the opportunity for rewarding good management.”

Gambar 1
Posisi Kredit Perbankan 1991 – 2000



(Dalam trilliu rupiah)

Sumber : Bank Indonesia (Bisnis Indonesia, Februari 2001)

Dengan demikian kalangan manajer perbankan dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, tanpa harus mengkambing hitamkan situasi ataupun kondisi lingkungan yang ada. Dibutuhkan adanya moral baik, ketajaman visi, dan kepekaan intuisi terhadap kondisi internal maupun eksternal bank yang dikelolanya dalam upaya antisipasi (*proaktif*) dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis.

Sampai pertengahan tahun 2001, sektor perbankan masih juga pelit untuk menyalurkan dananya ke sektor riil, padahal perbankan nasional telah menyerap dana pemerintah (rakyat) untuk restrukturisasi dan penyehatan sebesar Rp. 656,07 triliun (*Info Bank, Juli 2000, 9*). Nampaknya perbankan nasional lebih memilih cara-cara konservatif dengan menempatkan kelebihan likuiditasnya ke Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), walaupun *return*-nya belum tentu

mencukupi untuk menutup biaya dana pihak ketiga (*cost of fund*) plus biaya operasionalnya sehari-hari (*overhead cost*). Trauma masa lalu yang membawa kalangan perbankan saat ini untuk lebih berhati-hati (*prudent*), agar krisis masa lalu tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Namun hal tersebut berimplikasi negatif terhadap perkembangan sektor riil, yang saat ini sangat membutuhkan adanya dana segar (*fresh money*) untuk mempertahankan dan memacu pertumbuhan laju bisnis mereka, demi menjamin kelangsungan pasar, baik domestik maupun internasional.

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral tentu saja tidak diam dengan kenyataan yang ada saat ini, berbagai upaya telah dilakukan seperti; stabilisasi nilai rupiah, meredam laju inflasi, menurunkan suku bunga, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan telah memberikan hasil yang cukup baik. Sektor-sektor riil yang lebih tahan terhadap krisis moneter, seperti Usaha Kecil dan Mikro (UKM) di pacu lebih baik lagi agar dapat bertahan dan berkembang sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih berarti terhadap perekonomian secara nasional.

Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) yang tadinya tidak begitu diperhitungkan ternyata lebih tahan terhadap goncangan krisis moneter dibanding dengan bank-bank umum nasional yang ada. Di saat krisis terjadi pada perbankan nasional, BPR masih berjalan secara normal dalam memberikan pinjaman kepada para calon debiturnya, bahkan sebagian besar UKM yang dikenal dengan '*small is beautiful*' dari berbagai sektor ekonomi lebih akrab dengan BPR-BPR tersebut.

Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR rata-rata di atas 90 %, yang menunjukkan bahwa di saat-saat krisis masih mampu sebagai lembaga intermediasi dengan baik. *Bad Debt Ratio* (BDR)-nya pun tidak terlalu tinggi, rata-rata sekitar 10 %, dalam artian masih dalam tingkatan yang wajar di saat kondisi krisis ini. Adanya Kredit Likuiditas Bank Indonesia berupa KMK-BPR (Kredit Modal Kerja-BPR) dan KPKM-BPR (Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro-BPR) sangat membantu sumber dana BPR dalam menyalurkan pinjaman dengan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Sehingga BPR merupakan salah satu tumpuan pengusaha kecil dan mikro di Indonesia, yang saat ini masih memberikan kontribusi yang cukup signifikan

mencukupi untuk menutup biaya dana pihak ketiga (*cost of fund*) plus biaya operasionalnya sehari-hari (*overhead cost*). Trauma masa lalu yang membawa kalangan perbankan saat ini untuk lebih berhati-hati (*prudent*), agar krisis masa lalu tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Namun hal tersebut berimplikasi negatif terhadap perkembangan sektor riil, yang saat ini sangat membutuhkan adanya dana segar (*fresh money*) untuk mempertahankan dan memacu pertumbuhan laju bisnis mereka, demi menjamin kelangsungan pasar, baik domestik maupun internasional.

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral tentu saja tidak diam dengan kenyataan yang ada saat ini, berbagai upaya telah dilakukan seperti; stabilisasi nilai rupiah, meredam laju inflasi, menurunkan suku bunga, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan telah memberikan hasil yang cukup baik. Sektor-sektor riil yang lebih tahan terhadap krisis moneter, seperti Usaha Kecil dan Mikro (UKM) di pacu lebih baik lagi agar dapat bertahan dan berkembang sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih berarti terhadap perekonomian secara nasional.

Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) yang tadinya tidak begitu diperhitungkan ternyata lebih tahan terhadap goncangan krisis moneter dibanding dengan bank-bank umum nasional yang ada. Di saat krisis terjadi pada perbankan nasional, BPR masih berjalan secara normal dalam memberikan pinjaman kepada para calon debiturnya, bahkan sebagian besar UKM yang dikenal dengan '*small is beautiful*' dari berbagai sektor ekonomi lebih akrab dengan BPR-BPR tersebut.

Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR rata-rata di atas 90 %, yang menunjukkan bahwa di saat-saat krisis masih mampu sebagai lembaga intermediasi dengan baik. *Bad Debt Ratio* (BDR)-nya pun tidak terlalu tinggi, rata-rata sekitar 10 %, dalam artian masih dalam tingkatan yang wajar di saat kondisi krisis ini. Adanya Kredit Likuiditas Bank Indonesia berupa KMK-BPR (Kredit Modal Kerja-BPR) dan KPKM-BPR (Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro-BPR) sangat membantu sumber dana BPR dalam menyalurkan pinjaman dengan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Sehingga BPR merupakan salah satu tumpuan pengusaha kecil dan mikro di Indonesia, yang saat ini masih memberikan kontribusi yang cukup signifikan

terhadap volume ekspor Indonesia. Namun di sisi lain kepentingan para penabung dan deposan tetap harus dijaga, demi mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat agar dapat menyimpan dananya pada BPR. Oleh karena itu perlu adanya parameter sebagai tolok ukur untuk mengetahui kondisi BPR bagi masyarakat.

BPR juga akan lebih tahan terhadap munculnya bank-bank asing maupun campuran yang beroperasi secara profesional dan lebih efisien dibanding perbankan nasional kita saat ini, karena BPR lebih banyak berlokasi di daerah kecamatan-kecamatan yang tidak dapat disentuh oleh bank asing maupun campuran. Segmen pasar BPR juga khusus dan relatif banyak, mengingat bangsa Indonesia mayoritas masih dalam taraf pengusaha kecil dan mikro yang secara geografis juga banyak berlokasi di daerah kecamatan maupun desa di seluruh Indonesia. Saat ini ada sekitar 2.400 BPR yang ada di Indonesia, dan 430 di antaranya berlokasi di Jawa Timur (*Bisnis Indonesia, Juli 2000*), dengan perkiraan asset sekitar Rp. 428 Milyar (rata-rata asset 2 Milyar) sangat signifikan kontribusinya dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat desa, khususnya para pengusaha kecil dan mikro yang berada di Jawa Timur.

Namun di sisi lain BPR tersebut memiliki kelemahan dalam bidang pengelolaan atau manajerial, sehingga masih ada beberapa yang dinyatakan tidak layak untuk beroperasi. Sedikitnya 30 % dari 430 BPR atau 129 BPR di Jawa Timur saat ini tengah menjalani pengawasan intensif dari Bank Indonesia (BI) menyusul buruknya kesehatan manajemen lembaga keuangan tersebut (*Bisnis Indonesia, Juli 2000*). Harian *Bisnis Indonesia* memberitakan bahwa sejak beberapa waktu terakhir Bank Indonesia telah melakukan pembinaan dan pengawasan serius untuk menyetatkan BPR-BPR yang masuk kategori Kurang Sehat (KS) dan Tidak Sehat (TS) tersebut (*Bisnis Indonesia, Juli 2000*). Kategori yang ada tersebut sangat bersifat terbatas, hanya dapat di baca oleh orang atau lembaga tertentu saja sehingga tidak dapat dibaca oleh semua pihak yang terkait secara langsung dengan BPR, khususnya masyarakat umum yang telah mempercayakan dananya di sana.

Nampaknya acuan Tingkat Kesehatan (selanjutnya disebut TKS) BPR yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut memang masih bersifat rahasia dan hanya

dapat dibaca oleh kalangan tertentu saja sehingga dapat dikatakan tidak informatif terhadap masyarakat umum. Oleh karena itu perlu adanya faktor-faktor yang dapat diukur oleh masyarakat umum sebagai dasar untuk melakukan transaksi dengan BPR bersangkutan, baik itu sebagai deposan maupun debitur. Hal tersebut untuk menghindari penyalahgunaan pihak BPR, baik manajemen maupun pemilik atas dana masyarakat yang ada pada BPR tersebut. Faktor-faktor tersebut sedapat mungkin dapat dibaca (dianalisis) oleh calon deposan dan calon debitur maupun yang sudah *exist* dengan hanya melihat laporan keuangan yang dipublikasikan oleh BPR (tidak rahasia). Minimal ada beberapa faktor finansial yang terkait langsung dengan pengelolaan BPR yang secara signifikan turut mempengaruhi TKS BPR tersebut. Faktor-faktor finansial tersebut setidaknya bersifat lebih umum terhadap semua BPR yang ada.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada 30 % dari 430 BPR di Jawa Timur yang sedang dalam perawatan intensif (KS dan TS), namun tidak dapat diketahui secara pasti BPR-BPR mana saja yang masuk kategori kurang sehat (KS) dan tidak sehat (TS) tersebut. Sehingga, permasalahan penting saat ini adalah mencari dan menentukan faktor-faktor finansial yang mempengaruhi TKS dari BPR-BPR yang ada di Jawa Timur. Dengan membaca laporan keuangan publikasi dari BPR akan dapat diketahui faktor-faktor finansial yang mempengaruhi TKS BPR bersangkutan. Hal ini kiranya tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat umum, namun juga akan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait lainnya seperti Manajemen BPR, Kreditur, serta pemegang saham BPR secara umum. Bahkan BPR lain pun dapat melihat kondisi industri BPR secara keseluruhan di Jawa Timur, untuk mengatur strategi dalam pengambilan keputusan, termasuk penyusunan *business plan*.

1.2 Perumusan Masalah

Pentingnya informasi mengenai TKS BPR tidak dapat disangsikan lagi, mengingat begitu banyaknya kepentingan atau hak yang terkait dalam operasional setiap BPR. Namun permasalahannya sekarang, bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan terhadap BPR, dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi TKS BPR, dengan hanya melihat laporan keuangan publikasi (tidak rahasia)

sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat untuk berhubungan dengan BPR bersangkutan.

Mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi TKS BPR yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia saat ini masih bersifat rahasia, maka perlu diupayakan untuk menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi TKS BPR tersebut. Apalagi BPR yang bermasalah saat ini di Jawa Timur jumlahnya cukup signifikan, 30 % dari 430 BPR. Dengan berbekal informasi berupa hasil akhir TKS intern BPR dan laporan keuangan tahunan dari BPR yang tidak bersifat rahasia, akan dianalisis faktor-faktor finansial yang mempengaruhi TKS dari BPR-BPR yang ada di Jawa Timur. Dari uraian tersebut, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor finansial berupa permodalan (*CAR*), kualitas aktiva produktif (*KAP* dan *PPAP/PPAPWD*), rentabilitas (*ROA* dan *BOPO*), dan likuiditas (*QR* dan *LDR*) mempengaruhi TKS BPR di Jawa Timur ?
2. Faktor finansial manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap TKS BPR di Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini nantinya adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor finansial berupa permodalan (*CAR*), kualitas aktiva produktif (*KAP* dan *PPAP/PPAPWD*), rentabilitas (*ROA* dan *BOPO*), dan likuiditas (*QR* dan *LDR*) terhadap TKS BPR di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui faktor finansial manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap TKS BPR di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

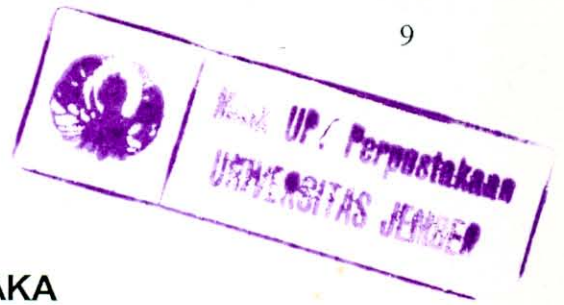
1.4.1 Manfaat Penelitian Operasional

1. Hasil penelitian dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum di Jawa Timur, khususnya calon deposan, calon debitur, dan nasabah BPR yang *exist* saat ini, sehingga mampu mengambil

- keputusan yang tepat dalam menyimpan dananya ataupun meminjam (kredit) kepada BPR yang berlokasi di Jawa Timur.
2. Hasil penelitian dapat memberikan informasi awal yang berarti bagi calon investor atau kreditur yang akan memberikan bantuan modal kerja kepada BPR-BPR yang berada di Jawa Timur, sehingga dapat menjaga keamanan investasi yang ditanamkan pada BPR bersangkutan.
 3. Hasil penelitian dapat memberikan informasi yang berarti bagi manajemen BPR-BPR yang ada di Jawa Timur sebagai tolak ukur (*benchmarking*) dalam industri perbankan (BPR Jawa Timur) untuk mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategis bagi BPR yang dikelolanya.

1.4.2 Manfaat Penelitian Akademis

1. Hasil Penelitian dapat memberikan sumbangan pada khasanah ilmu pengetahuan, khususnya bidang manajemen keuangan ataupun perbankan tentang pengukuran tingkat kesehatan BPR dengan hanya melihat laporan keuangan yang ada (publikasi).
4. Hasil penelitian dapat memberikan informasi awal dan landasan yang berarti untuk digunakan oleh pihak yang membutuhkan dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbankan, khususnya BPR.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian terhadap era globalisasi. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan perbankan secara menyeluruh. Ukuran tingkat kesehatan bank ini merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu mengikatkan diri dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan bank yang sehat (SE, BI No. 23/21/BPP/ 28 Feb. 1991). Fungsi pengelola atau manajer bank tentunya sangat memegang peranan dalam upaya penyehatan perbankan, baik secara individual maupun secara keseluruhan dalam industri perbankan nasional.

2.1.1 Tingkat Kesehatan Bank

Dalam pemeriksaan bank, sebagai implikasi terhadap fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia, maka pemeriksaan tersebut harus mengacu pada ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank ini pada prinsipnya merupakan kepentingan pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun bagi pengawas dan pembina bank. Ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai (Dahlan Siamat, 1993; 22) :

1. Standar bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sesuai dengan asas-asas perbankan yang sehat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Standar untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun untuk industri perbankan secara umum.

Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang mempengaruhi terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank.

Faktor-faktor yang dinilai untuk menentukan kesehatan bank menurut kriteria Bank Indonesia antara lain adalah sebagai berikut (SK Dir. BI No.30/11/KEP/DIR,1997, Psl;7-12) :

1. Permodalan yaitu ketentuan minimum rasio modal
2. Kualitas aktiva produktif yaitu : a) Rasio aktiva yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif, dan b) Rasio cadangan penghapusan terhadap aktiva yang diklasifikasikan.
3. Manajemen yaitu : a) Manajemen permodalan, b) Manajemen kualitas aktiva, c) Manajemen umum, d) Manajemen rentabilitas, dan e) manajemen likuiditas.
4. Rentabilitas yaitu : a) Rasio laba terhadap total aktiva, dan b) Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional.
5. Likuiditas yaitu : a) Rasio *call money* terhadap total aktiva, dan b) Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga.
6. Pelaksanaan ketentuan tertentu seperti : a) Batas maksimum pemberian kredit, b) Posisi devisa netto, c) Pemberian kredit usaha kecil.

Berdasarkan penilaian secara keseluruhan atas faktor-faktor penilaian tersebut di atas, maka penilaian kesehatan bank dapat digolongkan dalam 4 (empat) kriteria :

Tabel 2.1
Nilai Tingkat Kesehatan Bank

No.	Tingkat Kesehatan	Nilai
1	Sehat	81 < 100
2	Cukup Sehat	66 < 80
3	Kurang Sehat, dan	51 < 65
4	Tidak Sehat	0 < 50

Sumber : SK Dir. BI No.30/11/KEP/DIR, 1997, Psl;13, ayat (3)

2.1.2 Perbankan, Bank, dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat)

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 10/1998, ps. 1, ayat (1)). Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10/1998, ps. 1, ayat (2)). Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 10/1998, ps. 1, ayat (4)). Umumnya BPR-BPR ini berlokasi di sentra-sentra bisnis di kecamatan-kecamatan seluruh Indonesia dan cukup memiliki peranan dalam upaya menumbuhkan usaha kecil dan mikro di daerah. Agar dapat lebih jelas kita akan lihat terlebih dahulu beberapa ciri-ciri khusus dalam industri perbankan.

Berdasarkan definisi bank tersebut, maka sifat usaha bank dapat dibedakan sebagai berikut (Dahlan Siamat, 1993, 13):

1. Sisi pasiva, yaitu kegiatan melakukan penarikan dana dari masyarakat dan pihak ketiga lainnya dengan berbagai instrumen utang.
2. Sisi aktiva, yaitu kegiatan usaha yang berhubungan dengan penggunaan dana, terutama dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Sisi jasa-jasa, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pemberian jasa-jasa dalam mekanisme pembayaran.

Namun khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak melakukan usaha seperti yang tersebut pada point 3 (tiga) di atas, karena tidak tergolong sebagai bank umum. BPR tidak dapat menerbitkan bilyet giro ataupun check seperti halnya bank umum lainnya, dan tidak dapat melakukan kliring antar bank sekalipun antara BPR itu sendiri. Walaupun demikian BPR tidak lepas dari pengawasan dan pembinaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, karena banyak kepentingan yang terlibat, khususnya dana pihak ke tiga.

2.1.3 Ciri-Ciri Khusus Industri Perbankan

Setiap jenis kegiatan usaha akan memberikan warna tersendiri kepada sistem keuangan atau akuntansinya. Begitu pula dengan industri perbankan yang mempunyai ciri-ciri khusus dalam kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan jenis industri yang lain (Lapoliwa, 1999, 162, Muljono;1992;2,29). Beberapa ciri khusus tersebut antara lain :

1. Sebagian besar aktiva suatu bank berupa aktiva likuid yang sifatnya tak berwujud. Sedangkan aktiva yang berwujud umumnya relatif sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan keseluruhan aktiva yang dimiliki.
2. Produk dan jasa yang diperdagangkan dalam industri perbankan berpusat pada hal-hal yang bersangkutan dengan uang. Sehingga uang bagi bank mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai barang yang diperdagangkan dan sebagai modal kerja bagi bank itu sendiri.
3. Produk yang diperdagangkan dalam industri perbankan adalah berupa jasa yang bersifat abstrak, sehingga sulit untuk mengidentifikasi biaya per unit produk yang dijual seperti pada industri manufaktur.
4. Hampir setiap bank yang besar beroperasi dengan cabang yang banyak dan tersebar di seluruh dunia. Kegiatan-kegiatan yang ada di cabang-cabang perlu dikoordinir oleh kantor pusatnya. Dengan demikian pemusatan kegiatan pada industri perbankan akan berbeda dengan industri manufaktur, dan akan mempengaruhi administrasi dan sistem akuntansinya.

2.1.4 Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan

Berbagai kekhususan dalam industri perbankan seperti yang diuraikan di atas mempunyai pengaruh terhadap proses akuntansinya, walaupun konsep dasar serta prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan tidak berbeda. Karena itu akan diuraikan beberapa dasar yang membedakan akuntansi perbankan dengan akuntansi yang berlaku umum. Dasar-dasar tersebut antara lain :

1) *Accrual Basis* Dalam Pencatatan Biaya

Sebagian besar biaya bank timbul sejalan dengan berlangsungnya waktu. Komponen biaya bank terbesar, yaitu biaya sumber dana, selain dipengaruhi oleh tingkat bunga juga dipengaruhi oleh lamanya dana tersebut digunakan oleh bank bersangkutan. Disamping biaya sumber dana adapula biaya-biaya yang berbentuk biaya yang dibayar dimuka (*prepaid expenses*) dan biaya yang masih harus dibayar (*deferred charges*). Kedua jenis biaya ini akan dialokasikan biayanya ke periode-periode yang menerima manfaatnya. Bila diperhatikan sifat dan jenis operasi perbankan yang sebagian besar berhubungan dengan periode terjadinya, maka sebaiknya perlakuan akuntansi terhadap biaya perbankan dilaksanakan secara *accrual* (*American Institute of Banking*, 1975, 290).

2) *Cash Basis* Dalam Pencatatan Pendapatan

Pada metode *cash basis*, pencatatan transaksi dilakukan bila ada arus masuk/keluar dari uang tunai. Pendapatan akan dicatat bila penerimaan uang tunai, dan pengeluaran dicatat bila ada pengeluaran uang tunai. Umumnya, pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan adalah bagian terbesar dari pendapatan bank. Dalam pencatatan pendapatan bunga pinjaman yang diberikan ini, bank menghadapi masalah dalam metode pencatatannya. Bila bank menggunakan *accrual basis*, maka pencatatan pendapatan bunga pinjaman akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Bila bank menggunakan *cash basis*, maka pencatatan pendapatan bunga pinjaman akan dilakukan pada saat bank menerima pembayaran bunga dari nasabah. Untuk menjaga jangan sampai pendapatan bunga pinjaman ini menjadi *overstated* akibat adanya kemungkinan pinjaman yang macet, maka sesuai dengan sifat *konservatif* pendapatan bunga pinjaman ini sebaiknya di catat dengan metode *cash basis* (Lapoliwa, 1999, 264).

2.1.5 Laporan Kepada Bank Sentral

Berbeda dengan jenis usaha lainnya, bank-bank yang beroperasi di Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara rutin kepada bank sentral (Bank Indonesia, 1988, 1991). Beberapa laporan yang harus disusun oleh bank-bank di Indonesia adalah :

a) Laporan Mingguan

Terdiri dari tiga laporan; Pertama, laporan likuiditas. Kedua, laporan kegiatan pasar uang antar bank. Ketiga, laporan aktivitas devisa. Laporan-laporan tersebut disusun setiap minggu dan harus diserahkan setiap bank dan cabang-cabangnya kepada Bank Indonesia di masing-masing wilayah kerja Bank Indonesia yang bersangkutan (SE BI No. 23/17/BPPP : 1991). Laporan mingguan ini juga digunakan sebagai sarana pengawasan beberapa ketentuan seperti posisi devisa neto, *margin trading*, maupun penyusunan statistik.

b) Laporan Bulanan

Laporan ini terdiri dari sebelas sandi yang menyangkut lengkap dan terperinci tentang neraca dan perhitungan laba/rugi beserta perincian-perinciannya, juga dikenal sebagai laporan sandi (SE BI No. 23/1/URES : 1991). Masing-masing pos yang ada telah dikonversikan dalam sandi-sandi tertentu yang telah distandardisasi Bank Indonesia. Laporan bulanan ini juga digunakan untuk menghitung kebutuhan modal, menilai tingkat kesehatan bank, dan statistik moneter.

c) Laporan Triwulanan

Merupakan laporan atas neraca dan perhitungan laba/rugi bank, yang harus diumumkan di dalam mass media agar dapat diketahui masyarakat luas (SK BI No. 23/77/Kep/Dir : 1991). Dengan demikian posisi keuangan masing-masing bank dapat diketahui nasabahnya. Pengumuman laporan triwulanan ini harus dilaksanakan selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Bentuk laporan keuangan ini juga telah distandardisasi oleh Bank Indonesia sehingga dapat dengan mudah dipahami masyarakat luas.

d) Laporan Tahunan

Terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi bank serta penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu. Laporan ini harus disetujui oleh akuntan luar (akuntan terdaftar). Selain laporan-laporan di atas, ada laporan-laporan semesteran (laporan badan pengawas/dewan komisaris bank, dan laporan pelaksanaan kartu kredit untuk bank yang mengeluarkan kartu kredit) dan laporan yang tidak berkala, seperti: laporan yang bertalian dengan pengawasan dan pembinaan bank-bank, laporan

yang bertalian dengan pengeralahan dana, laporan yang berhubungan dengan pengkreditan, laporan yang berhubungan dengan transaksi devisa, dan laporan hasil pemeriksaan bank asing oleh pejabat-pejabat pemeriksa dari luar negeri.

Tabel 2.2
FORMAT NERACA PERBANKAN DI INDONESIA

NERACA BANK: Tanggal : (dalam jutaan rupiah)									
AKTIVA					PASIVA				
No	Pos-pos	Rp	Vls	Ttl	No	Pos-pos	Rp	Vls	Ttl
1.	Kas				1	Giro			
2.	Bank Indonesia				2	Call Money			
3.	Tagihan Pada Pihak Lain:				3	Tabungan			
	a) Giro				4	Deposito Berjangka			
	b) Call Money				5	Kewajiban Lainnya			
	c) Deposito Berjangka				6	Surat Berharga			
	d) Kredit Yang Diberikan				7	Pinjaman Yang Diterima			
4	Surat Berharga dan Tagihan lainnya				a) Bank Indonesia				
5	Kredit Yang diberikan				b) Subordinasi				
6	Penyertaan				c) Lainnya				
7	Cadangan Aktiva Yang Di klasifikasikan				8	Rupa-rupa Pasiva			
8	Aktiva Tetap dan Inventaris (nilai buku)				9	Modal Disetor			
9	Rupa-rupa Aktiva				10	Laba/Rugi			
JUMLAH					JUMLAH				

1) Vls : Valuta Asing

2) Ttl : Total

Sumber : **Bank Indonesia**, Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 27, Tentang Penyempurnaan dan Pembinaan Bank, 28 Februari 1991.

Tabel 2.3
FORMAT PERHITUNGAN LABA/RUGI PERBANKAN DI INDONESIA

PERHITUNGAN LABA/RUGI BANK : _____ (TANGGAL ____ 19 ____) (dalam jutaan rupiah)			
	RUPIAH	VALAS	TOTAL
I. PENDAPATAN 1. PENDAPATAN OPERASIONAL 1.1. HASIL BUNGA 1.2. PROVISI DAN KOMISI 1.3. PENDAPATAN DARI TRANSAKSI DEvisa 1.4. PENDAPATAN RUPA-RUPA 2. PENDAPATAN NON OPERASIONAL JUMLAH			
II. BIAYA 1. BIAYA OPERASIONAL 1.1. BIAYA BUNGA DAN PROVISI 1.2. BIAYA TRANSAKSI DEvisa 1.3. BIAYA TENAGA KERJA 1.4. PENYUSUTAN 1.5. BIAYA RUPA-RUPA 2. BIAYA NON OPERASIONAL JUMLAH			
III. LABA/RUGI SEBELUM PAJAK IV. SISA LABA/RUGI TAHUN LALU V. TRANSFER KE KANTOR PUSAT*) JUMLAH			
..... DIREKSI BANK _____			

*) Untuk Bank Asing

Sumber : Bank Indonesia, Himpunan Ketentuan Lanjutan PAKTO 27, 1988 Tentang Pembinaan Bank
 28 Februari 1991.

2.1.6 Laporan Keuangan Bank-Bank Di Indonesia

Untuk keperluan berbagai pihak terhadap informasi keuangan suatu bank yang beroperasi di Indonesia, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi setiap bank untuk setiap tiga bulan, yaitu tiap akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan keuangan di atas disusun secara standar. Secara lengkap laporan keuangan tersebut pada Tabel 2.2 halaman 15 untuk neraca dan Tabel 2.3 halaman 16 untuk laporan laba rugi. Dengan adanya keseragaman akan memudahkan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan bank.

2.1.7 Faktor CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*)

Surat Keputusan Direksi BI No. 23/81/KEP/DIR dan SE BI No. 23/21/BPPP tanggal 28 Februari 1991 antara lain menyatakan bahwa tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, maupun BI sebagai pengawas dan pembina bank. Untuk memungkinkan diperolehnya pedoman yang lebih jelas, maka dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank telah ditetapkan beberapa komponen yang dinilai cukup penting atau strategis untuk dapat dikuantifikasikan. Sebagai contoh penilaian tingkat kesehatan bank di negara Amerika Serikat yang dilakukan dengan cara menilai berbagai indikator keuangan bank yang terdiri dari (Widjanarto, 1993, 98) :

1. *Capital adequacy*
2. *Assets Quality*
3. *Management of risks*
4. *Earning Ability*
5. *Liquidity sufficiency*

Sistem penilaian tingkat kesehatan bank tersebut terkenal dengan sebutan *CAMEL rating system*, yang juga telah direkomendasi oleh *Bank for International Settlements* (BIS). Bank Sentral Boston, negara bagian Amerika Serikat bersama *Boston College* menulis artikel mengenai *CAMEL*. Demikian juga halnya Bank Sentral Minneapolis, negara bagian Amerika Serikat menulis artikel mengenai apa

itu CAMEL dan siapa yang harus mengetahuinya ? Masing-masing akan diuraikan singkat seperti berikut ini.

1. *Joe Peek, et al* (1997;7,8) dalam artikelnya menyimpulkan bahwa :

“ Pengukuran dari informasi pengawasan yang bersifat rahasia yang kami gunakan adalah *CAMEL rating*, yang digunakan juga oleh bank untuk menguji beberapa sampel agar dapat melihat peringkat bank-bank secara individual. Skor CAMEL yang digunakan pada bank-bank didasarkan pada 5 kategori dalam analisis para pengawas bank saat mengevaluasi kesehatan dari suatu bank; Capital, Assets, Management, Earnings, dan Liquidity. Masing-masing bank diperingkat dari 1 (satu), *the highest*, sampai dengan 5 (lima), *the lowest*, pada masing-masing kategori komponen dan diberikan suatu peringkat gabungan. Bank-bank dengan nilai 1 (kondisi yang selalu baik) atau nilai 2 (dilihat secara fundamental kondisi baik) secara peringkat tidak akan menemui kendala yang serius dari pandangan para pengawas. Sedangkan bank-bank dengan nilai 3 (kondisi kinerja yang kurang baik / cacat) dimana kemungkinan beberapa permasalahan akan ditemukan oleh pengawas, tetapi masalah-masalah yang ada masih dapat diatasi. Bank-bank dengan nilai 4 (potensial untuk gagal, kelangsungan hidup terancam) memiliki risiko kegagalan yang signifikan. Dan bank-bank dengan nilai 5 (sudah bangkrut) kinerja sama sekali kurang atau bahkan tidak dapat diperbaiki lagi”.

2. *Ron Feldman, et al* (1999;2), dalam artikelnya menyatakan bahwa:

“ Pada tahun 1979, didirikan sebuah perwakilan pengaturan bank yaitu *the Uniform Financial Institutions Rating System (UFIRS)*. Dibawah lembaga *UFIRS* tersebut sebuah bank ditetapkan peringkatnya berdasarkan kinerja dalam 5 area : Kecukupan modal, Kualitas dari aktiva, Kemampuan manajemen, Kualitas dan Tingkat penghasilan dan Kecukupan likuiditas. Para pengawas bank menetapkan peringkat dari 1 sampai dengan 5 untuk masing-masing komponen dan satu nilai gabungan pada sebuah bank. Nilai 1 sampai dengan 5 ini merupakan peringkat gabungan yang telah dikenal terutama dengan istilah CAMEL. *The UFIRS* telah merevisi CAMEL menjadi CAMELS pada akhir tahun 1996 dengan tambahan satu komponen berupa kepekaan (S) sebuah bank

terhadap risiko pasar (yaitu, suatu penilaian dimana perubahan harga di pasar berpengaruh secara negatif terhadap tingkat bunga pada lembaga keuangan). Pada akhir tahun 1996 juga terjadi suatu perubahan dalam komunikasi kebijakan untuk pemeringkatan bank. Berawal di tahun 1997, para pegawai bank hanya melaporkan angka dari peringkat gabungan kepada bank. Para pengawas terus melarang untuk menyampaikan kepada publik mengenai penilaian komponen dan penilaian gabungan untuk bank tertentu".

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia adalah sistem *CAMEL* plus, karena di samping menilai keadaan keuangan bank yang meliputi unsur-unsur *CAMEL*, juga dinilai keadaan atau unsur-unsur yang tidak termasuk dalam keadaan

Tabel 2.4

**FAKTOR DAN KOMPONEN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK
BESERTA BOBOTNYA**

FAKTOR YANG DINILAI	KOMPONEN	BOBOT
1. PERMODALAN	a. Rasio modal	20 %
2. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF	a. Rasio aktiva yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif (25 %) b. Rasio cadangan penghapusan terhadap aktiva yang diklasifikasikan (5 %)	30 %
3. MANAJEMEN	a. Manajemen modal (1,8 %) b. Manajemen kualitas aktiva (6,8%) c. Manajemen umum (17,4 %) d. Manajemen rentabilitas (2,4 %) e. Manajemen likuiditas (1,8 %)	30 %
4. RENTABILITAS	a. Rasio laba total asset (5 %) b. Rasio biaya operasional: Pendapatan operasional (5 %)	10 %
5. LIKUIDITAS	a. Rasio call money: Aktiva lancar (5 %) b. Rasio pinjaman: Dana pihak ketiga (5 %)	10 %

keuangan bank yang merupakan faktor plus, yaitu kepatuhan terhadap peraturan-peraturan, khususnya peraturan dibidang perbankan (SK Dir. BI No.30/11/KEP/DIR,1997, Psl;12)). Atau biasanya hal-hal ini dimasukkan dalam faktor manajemen. Sehingga, dalam penelitian ini nantinya hanya melihat dari aspek keuangan secara murni, agar subjektivitas dari penilai dapat dihilangkan sama sekali. Terhadap faktor dan komponen tersebut diberikan bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan bank. Kuantifikasi faktor dan komponen penilaian tingkat kesehatan bank beserta bobotnya masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.4 pada halaman 19 (SK Dir. BI No.30/12/KEP/DIR, 1997, Psl;4).

1) Permodalan (*Capital*)

Bank Indonesia telah mengeluarkan SK Direksi BI No. 23/67/KEP/DIR serta SE BI No. SE 23/11.BPPP tertanggal 28 Februari 1991 perihal kewajiban penyediaan modal minimum bank, yang ketentuannya didasarkan pada standar yang ditetapkan oleh BIS (*Bank for International Settlements*). Menurut BIS, masing-masing negara dapat melakukan penyesuaian dalam penerapan prinsip perhitungan permodalan dengan memperhatikan kondisi perbankan setempat. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang di anut BIS, kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontinjen atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Seperti diketahui, risiko terhadap aktiva dalam arti luas dapat timbul baik dalam bentuk risiko kredit maupun risiko yang terjadi karena fluktuasi harga surat-surat berharga, dan tingkat bunga serta nilai tukar valuta asing. Secara teknis, kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR), sedangkan pengertian modal meliputi modal inti dan modal pelengkap.

Kewajiban penyediaan modal minimum bank diukur dari persentase tertentu terhadap ATMR. Sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh BIS, terhadap seluruh bank di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8 % sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 SK Direksi BI No. 23/67/KEP/DIR.

$$\frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \% = \text{Rasio Modal (CAR)}$$

Guna memberikan kesempatan kepada perbankan di Indonesia melakukan penyesuaian permodalan berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8 % dapat dilakukan secara bertahap, yaitu sekurang-kurangnya :

1. 5 % sejak akhir Maret 1992
2. 7 % sejak akhir Maret 1993
3. 8 % sejak akhir Desember 1993

a) Pengertian Modal Bank

Berdasarkan ketentuan BI tentang pengertian modal, maka modal bank terdiri dari (SK Dir. BI No.26/20/KEP/DIR, 1993):

1. Modal inti
2. Modal pelengkap

b) Modal Inti

Modal inti terdiri atas modal setor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa :

1. **Modal disetor**, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.
2. **Agio saham**, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
3. **Cadangan umum**, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.
4. **Cadangan tujuan**, yaitu bagian laba yang telah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

5. **Laba yang ditahan (*retained earnings*)**, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
6. **Laba tahun lalu**, yaitu laba bersih tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50 %. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun yang lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal inti.
7. **Laba tahun berjalan**, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50 %. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal inti.
8. **Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan (*minority interest*)**, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan, atau lembaga pembiayaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

Apabila dalam pembukuan bank terdapat *goodwill*, maka jumlah modal inti pada angka satu sampai dengan angka delapan di atas harus dikurangi dengan jumlah *goodwill* tersebut.

c) Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa :

1. **Cadangan evaluasi aktiva tetap**, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

2. **Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan**, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori cadangan ini termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai surat-surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25 % dari jumlah aktiva tertimbang menurut risiko.
3. **Modal kuasi (yang menurut BIS disebut *Hibrid Capital Instrument*)**, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang dan mempunyai ciri-ciri :
 - a. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal (*subordinated*) dan telah dibayar penuh.
 - b. Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI.
 - c. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi *retained earnings* dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
 - d. Pembayaran bunga dapat ditanggguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

Dalam pengertian modal kuasi ini termasuk cadangan modal dari penyeteroran modal efektif oleh pemilik bank yang belum didukung oleh modal dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari instansi berwenang) yang mencukupi.

4. **Pinjaman subordinasi**, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.
 - b. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BI. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
 - c. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh.

- d. Minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun
- e. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari BI, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.
- f. Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Jumlah pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu lima tahun terakhir adalah jumlah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (prorata). Maksimum pinjaman subordinasi yang dapat dijadikan komponen modal pelengkap adalah sebesar 50 % dari modal inti.

d) Bobot Risiko Aktiva Neraca

Rincian bobot risiko untuk semua aktiva neraca bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing adalah sebagai berikut (SK Dir. BI.No.26/20/KEP/DIR, 1993) :

- 0 %
1. Kas
 2. Emas dan mata uang emas
 3. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh:
 - a. Pemerintah Pusat RI
 - b. Bank Indonesia
 - c. Bank Sentral negara OECD dan non-OECD
- 20 %
1. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh:
 - a. Bank-bank di dalam negeri (termasuk kantor cabang bank asing)
 - b. Pemerintah daerah Indonesia
 - c. Lembaga nondepartemen di Indonesia
 - d. Bank-bank pembangunan multilateral seperti: ABD, IDB, IBRD, AFDB, dan EIB
 - e. Bank-bank di luar negeri
 - f. Perusahaan milik pemerintah pusat negara OECD
 2. Tagihan dalam rangka inkaso

50 % Kredit pemilikan rumah (KPR) yang dijamin oleh hipotik pertama dengan tujuan untuk dihuni. Kredit kepada *real estate* tidak termasuk dalam kriteria ini

100 % 1. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh:

- a. Perum atau Perjan
- b. BUMN atau BUMD
- c. Perusahaan milik pemerintah pusat negara non-OECD
- d. Koperasi
- e. Perusahaan swasta
- f. Perorangan
- g. Lain-lain

2. Pernyataan yang tidak dikonsolidasikan

e) Bobot Risiko Aktiva Administratif

Perhitungan bobot risiko aktiva administrasi dilakukan melalui dua tahap:

A. Tahap Pertama

Aktiva administratif terlebih dahulu ditetapkan faktor konversinya, yaitu faktor tertentu yang digunakan untuk mengkonversikan aktiva administratif ke dalam aktiva neraca yang menjadi padanannya. Besarnya faktor konversi untuk masing-masing aktiva administratif didasarkan pada tingkat kemungkinannya untuk menjadi aktiva neraca yang efektif. Rincian faktor konversi aktiva administratif baik rupiah maupun valuta asing adalah sebagai berikut:

20 % L/C yang masih berlaku (tidak termasuk *standby L/C*)

50 % Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit seperti *bid bonds*, *performance bonds* dan *advance payment bonds*.

100 % 1. Fasilitas kredit yang belum digunakan

2. Jaminan (termasuk *standby L/C*) dan *risk sharing* dalam rangka pemberian kredit, serta endosemen atau aval surat-surat berharga

3. Kewajiban membeli kembali aktiva bank yang dijual dengan syarat *repurchase agreement*

B. Tahap Kedua

Setelah diketahui faktor konversinya, maka masing-masing aktiva administratif tersebut dikonversikan ke dalam aktiva neraca padanannya. Selanjutnya, perhitungan bobot risiko aktiva administratif dilakukan dengan mengalikan faktor konversi dengan bobot risiko aktiva neraca padanannya. Dapat ditambahkan bahwa khusus untuk kontrak berjangka valuta asing dan swap bunga (interest rate swap) ditetapkan bobot risiko sebesar 4 % dari posisi neto per valuta aktiva dan pasiva administratif. Atas dasar perhitungan tersebut, pengelompokan besarnya bobot risiko masing-masing aktiva administratif menjadi sebagai berikut:

- 0 % Fasilitas yang disediakan bagi atau dijamin oleh Pemerintah Pusat RI dan BI, serta bank sentral dan pemerintah pusat negara OECD dan non-OECD, yang meliputi:
1. Fasilitas kredit yang belum digunakan
 2. Jaminan (termasuk *standby L/C*) dan *risk sharing* dalam rangka pemberian kredit serta endosemen atau aval surat-surat berharga
 3. Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit seperti *bid bonds*, *performance bonds*, dan *advance payment bonds*
 4. *L/C* yang masih berlaku (tidak termasuk *standby L/C*)
- 4 %
1. *L/C* yang masih berlaku (tidak termasuk *standby L/C*) dan dibuka atas permintaan pemerintah daerah dan lembaga nondepartemen di Indonesia serta bank-bank pembangunan multilateral dan perusahaan milik pemerintah pusat negara OECD
 2. Posisi neto kontrak berjangka valuta asing dan swap bunga (*exchange rate and interest rate contracts*)
- 10 % Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka kredit seperti *bid bonds*, *performance bonds* dan *advance payment bonds* dan diterbitkan atas permintaan pemerintah daerah dan lembaga nondepartemen di Indonesia serta bank-bank pembangunan multilateral dan perusahaan milik pemerintah pusat negara OECD
- 20 %
1. Fasilitas yang disediakan bagi atau dijamin oleh bank dalam negeri, pemerintah daerah, dan lembaga nondepartemen di Indonesia serta bank-

bank pembangunan multilateral, dan perusahaan milik pemerintah pusat negara OECD, yang meliputi:

- a. Fasilitas kredit yang belum digunakan
 - b. Jaminan (termasuk standby L/C) dan risk sharing dalam rangka pemberian kredit serta endosemen atau aval surat-surat berharga
2. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk standby L/C) dan dibuka atas permintaan:
- a. Perum dan Perjan
 - b. BUMN dan BUMD
 - c. Perusahaan milik pemerintah pusat negara non-OECD
 - d. Koperasi
 - e. Perusahaan swasta
 - f. Perorangan
 - g. Lain-lain
- 50 % 1. Fasilitas kredit yang belum digunakan dan disediakan dalam rangka KPR yang dijamin oleh hipotik pertama dengan tujuan untuk dihuni. Fasilitas kredit kepada real estate yang belum digunakan tidak termasuk di dalam kriteria ini dan tergolong dalam bobot risiko 100 %
2. Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka kredit seperti bid bonds, dan advance payment bonds yang diterbitkan atas permintaan:
- a. Perum dan Perjan
 - b. BUMN dan BUMD
 - c. Perusahaan milik Pemerintah Pusat negara non-OECD
 - d. Koperasi
 - e. Perusahaan swasta
 - f. Perorangan
 - g. Lain-lain
- 100 % 1. Fasilitas yang disediakan bagi atau dijamin oleh Perum, Perjan, BUMN, BUMD, perusahaan milik pemerintah pusat negara non-OECD, koperasi perusahaan swasta, perorangan dan lain-lain meliputi:
- a. Fasilitas kredit yang belum digunakan

- b. Jaminan (termasuk *standby L/C*) dan *risk sharing* dalam rangka pemberian kredit
2. Kewajiban membeli kembali aktiva bank yang dijual kepada pihak lain dengan syarat *repurchase agreement*

f) Cara Perhitungan Kebutuhan Modal

1. Kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan ATMR. Sejalan dengan prinsip dasar perhitungan kebutuhan modal bank, ATMR adalah penjumlahan ATMR aktiva neraca dan ATMR aktiva administratif
 - a. ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko aktiva neraca
 - b. ATMR aktiva administratif diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko aktiva administratif
2. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas (tahap kedua), kewajiban penyediaan modal minimum bank adalah sebesar 8 % dari ATMR pada butir 1 di atas
3. Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan modal inti atau modal pelengkap dengan ATMR pada butir satu di atas
4. Dengan membandingkan rasio modal pada butir tiga dengan kewajiban penyediaan modal minimum tersebut pada butir dua, dapat diketahui apakah bank yang bersangkutan memenuhi ketentuan atau tidak

2) Kualitas Aktiva Produktif (Assets)

Kualitas aktiva produktif bank sangat penting artinya dalam usaha perbankan, bahkan dapat dikatakan bahwa kelangsungan hidup usaha bank sangat tergantung kepada kualitas penanaman dana bank serta kesiapan bank dalam mengantisipasi kemungkinan timbulnya kerugian dalam penanamannya. Sebelum melaksanakan penggolongan kolektibilitas aktiva produktif, kita harus memahami pengertian istilah-istilah yang tercantum dalam SK Direksi BI No. 23/68/KEP/DIR serta SE BI No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 perihal penggolongan kolektibilitas aktiva produktif dan pembentukan cadangan atas aktiva yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Aktiva produktif** adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya, yang dalam surat edaran ini meliputi:
 - a. Kredit yang diberikan
 - b. Surat-surat berharga
 - c. Penempatan dana pada bank lain baik dalam negeri maupun luar negeri
 - d. Penyertaan
2. **Kolektibilitas** adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.
3. **Kredit dengan angsuran** adalah kredit yang pembayaran kembali pokok kreditnya diatur secara bertahap menurut jadwal waktu yang ditentukan dalam perjanjian pinjam-meminjam termasuk perubahannya.
4. **Kredit tanpa angsuran** adalah kredit yang pembayaran kembali pokok kreditnya tidak diatur secara bertahap dalam perjanjian kredit.
5. **Tunggakan angsuran pokok** adalah angsuran pokok suatu kredit yang setelah tanggal jatuh waktu masa angsurannya belum dibayar. Untuk kredit annuitet angsuran terdiri dari pokok dan bunga kredit.
6. **Tunggakan pokok** adalah pokok dari kredit tanpa angsuran yang telah jatuh waktu namun belum dibayar.
7. **Tunggakan bunga** adalah bunga kredit baik kredit dengan angsuran maupun dengan tanpa angsuran yang telah jatuh waktu dan belum dibayar.
8. **Kredit yang diselamatkan** adalah kredit yang semula tergolong diragukan atau macet kemudian diusahakan untuk memperbaiki sebagaimana tercermin dalam akad penyelamatan kredit. Bentuk penyelamatan kredit dapat berupa:
 - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang baik meliputi besarnya angsuran maupun tidak.
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal

pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut: 1) Penanaman dana bank dan atau 2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau 3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Penyelamatan dengan cara ini dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

9. **Cerukan** adalah pemberian fasilitas pelampauan panarikan atas saldo rekening giro efektif yang belum dibuatkan akad kreditnya atau pelampauan pemberian kredit di atas plafon yang ditetapkan berdasarkan akad kredit.
10. **Surat berharga** adalah penanaman dalam bentuk SBI, SBPU, dan saham-saham serta obligasi yang diperdagangkan di pasar modal.
11. **Penyertaan** adalah penanaman dalam bentuk saham pada perusahaan lain yang tidak melalui pasar modal.

a) Kriteria Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Sebagaimana telah diuraikan, pengertian aktiva produktif dalam ketentuan baru meliputi: 1) pemberian kredit, 2) Surat berharga, 3) Penyertaan, dan 4) Penanaman pada bank lain. Namun pada landasan teori ini hanya dijelaskan yang berhubungan dengan kredit mengingat obyek penelitian adalah BPR, penggolongan kolektibilitas adalah sebagai berikut (SK Direksi BI No. 23/68/KEP/DIR, 1991):

a. Lancar

Suatu kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

1. Kredit dengan angsuran di luar kredit pemilikan rumah (KPR).
 - a. Tidak terdapat tunggakan pokok, tunggakan bunga, atau cerukan karena penarikan, atau
 - b. Terdapat tunggakan angsuran pokok, dan:
 1. Belum melampaui 1 (satu) bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 (satu) bulan, atau

2. Belum melampaui 3 (tiga) bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau
 3. Belum melampaui 6 (enam) bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan empat bulanan atau lebih.
 - c. Terdapat tunggakan bunga tetapi:
 1. Belum melampaui 1 (satu) bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan, atau
 2. Belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan, atau
 - d. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
2. Kredit dengan angsuran untuk KPR
 - a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, atau
 - b. Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui enam bulan.
 3. Kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran
 - a. Kredit belum jatuh waktu, dan tidak terdapat tunggakan bunga, atau
 - b. Kredit belum jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui tiga bulan, atau
 - c. Kredit telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang, atau
 - d. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
 4. Untuk kredit yang diselamatkan.

Memenuhi ketentuan tersebut pada butir 1 atau 2 dan selama satu tahun sejak timbulnya kewajiban pembayaran pokok dan atau bunga tidak ada tunggakan.
 5. Cerukan rekening giro

Terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

Walaupun suatu kredit memenuhi kriteria lancar, apabila menurut penilaian baik ditinjau dari keadaan usaha debitur maupun agunan kredit yang dikuasai oleh bank diperkirakan bahwa debitur yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan

sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut tidak dapat digolongkan sebagai lancar. Berdasarkan penilaian berat ringannya kesulitan yang dihadapi debitur, kredit tersebut dapat digolongkan sebagai kurang lancar, diragukan, atau macet.

b. Kurang lancar

Suatu kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini.

1. Kredit dengan angsuran di luar KPR

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang:

1. Melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari satu bulan, atau
2. Melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan, atau tiga bulanan, atau
3. Melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan enam bulanan atau lebih, atau

b. terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 (tiga puluh) hari kerja, atau

c. Terdapat tunggakan bunga yang:

1. Melampaui 1 (satu) bulan, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan, atau
2. Melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

2. Kredit dengan angsuran untuk KPR

Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 9 (sembilan) bulan.

3. Kredit tanpa angsuran

a. Kredit belum jatuh waktu dan

1. Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.

2. Terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga, atau
 - b. Kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan, atau
 - c. Ada cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 (lima belas) hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.
4. Kredit yang diselamatkan.
 - a. Tidak memenuhi kriteria tersebut pada butir 4 (kredit lancar) dan tidak ada tunggakan, atau
 - b. Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria tersebut pada butir a atau 3, atau
 - c. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.

c. Diragukan

Suatu kredit digolongkan diragukan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang debitur, atau
- b. Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari hutang debitur.

d. Macet

Suatu kredit digolongkan macet apabila:

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan, atau
- b. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit, atau
- c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

b) Pembentukan Cadangan Aktiva Yang Diklasifikasikan

Dalam pasal 4 SK Direksi BI No. 23/68/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 ditetapkan bahwa bank wajib membentuk cadangan yang cukup untuk menutup risiko kemungkinan kerugian yang timbul dari aktiva produktifnya. Dalam hubungan ini, dapat dikemukakan pedoman pembentukan cadangan sebagai berikut (SK. Dir. BI. No. 26/22/KEP/DIR, 1993):

1. Pada uraian terdahulu telah dikemukakan pedoman penggolongan kolektibilitas kredit atau aktiva produktif. Dalam rangka pembentukan cadangan, disamping menggunakan pedoman tersebut bank perlu melakukan penilaian, terutama yang bertalian dengan nilai dari agunan yang dapat dikuasai.
2. Pembentukan cadangan wajib dilakukan bagi seluruh jenis aktiva produktif baik bagi kredit yang diberikan, surat-surat berharga yang dimiliki, maupun penyertaan dan penanaman lainnya. Besarnya cadangan yang wajib dibentuk sekurang-kurangnya sebesar 1 % dari seluruh aktiva produktif, ditambah dengan:
 - a. 3 % dari aktiva produktif yang tergolong kurang lancar, setelah terlebih dahulu dikurangi nilai agunan yang dikuasai
 - b. 50 % dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai
 - c. 100 % dari aktiva produktif yang digolongkan macet dan masih tercatat dalam pembukuan bank, setelah terlebih dahulu dikurangi nilai agunan yang dikuasai

3) Manajemen (*Management*)

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini tidak melibatkan faktor manajemen karena telah terwakili pada faktor finansial yang diteliti, namun yang dimaksud manajemen disini adalah penilaian terhadap; 1) Manajemen modal, 2) Manajemen aktiva produktif, 3) Manajemen Rentabilitas, dan 4) Manajemen likuiditas, serta 5) Manajemen umum, termasuk kepatuhan terhadap aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

4) Rentabilitas (*Earning*)

Rentabilitas mengukur efektifitas bank dalam operasinya untuk memperoleh keuntungan atau laba. Dalam penelitian ini nantinya akan diukur dengan rasio keuntungan terhadap asset yang dimiliki bank dan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Adapun *Return on Asset* adalah rasio laba bersih terhadap total aktiva, mengukur tingkat pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak (Weston, 1990, 304). Sedangkan BOPO adalah rasio biaya operasi terhadap penghasilan operasi dari bank yang secara khusus mengukur efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan operasi bank yang bersangkutan.

5) Likuiditas (*Liquidity*)

Likuiditas mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik yang diukur dengan rasio lancar dan rasio LDR. Rasio tersebut menunjukkan sampai sejauh mana tagihan-tagihan jangka pendek dari para kreditur dapat dipenuhi dengan aktiva yang diharapkan akan dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu dekat (Weston, 1990, 295).

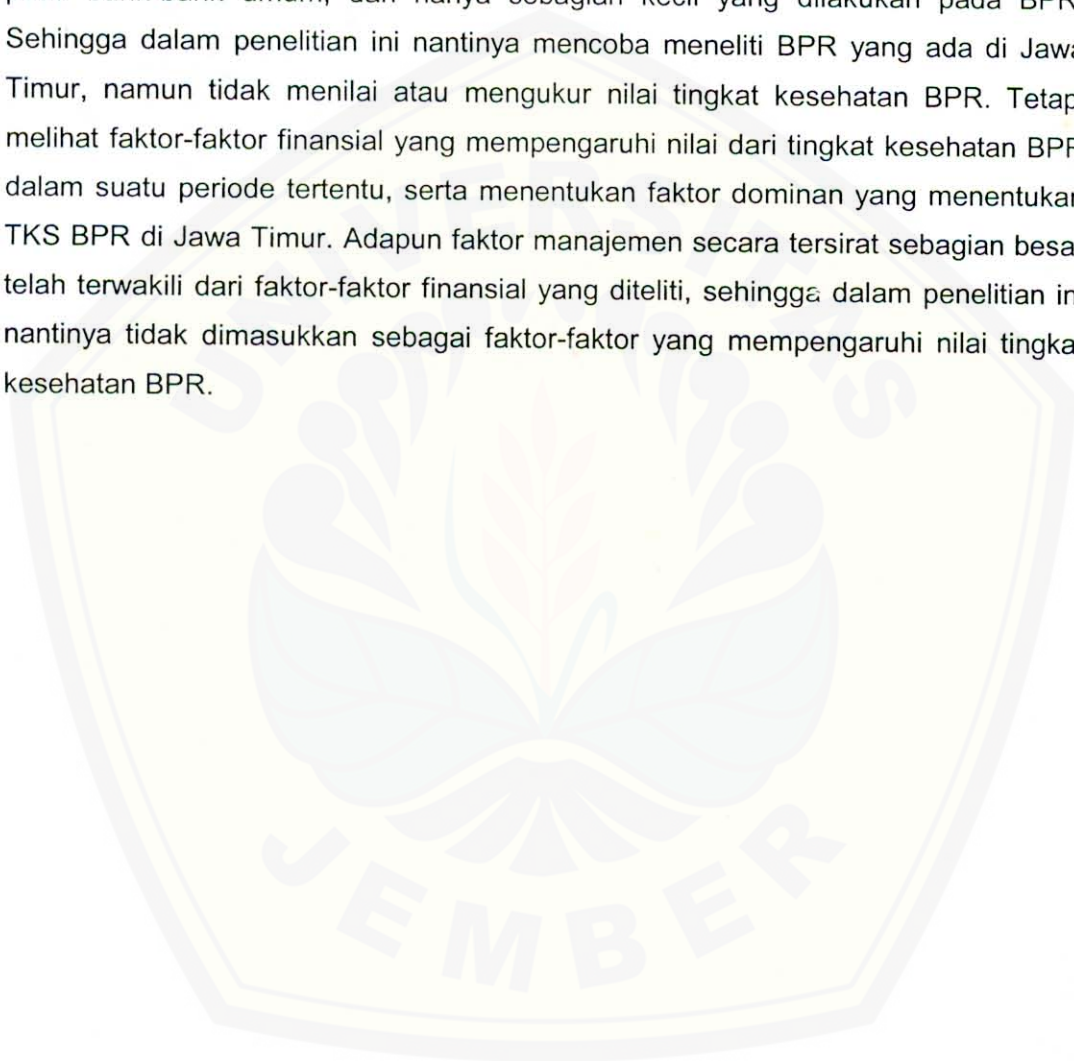
2.2 Penelitian sebelumnya

Sampai pada saat pembuatan proposal penelitian ini, kami telah mempelajari beberapa penelitian sebelumnya walaupun sebenarnya jenis penelitian yang ada tidak persis sama dengan penelitian ini nantinya. Beberapa penelitian atau penilaian dan pengukuran tingkat kesehatan bank sebelumnya dijelaskan secara singkat dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penilaian tingkat kesehatan dengan *CAMEL rating system (Capital, Asset, Management, Earning, and Liquidity)* telah dilakukan di berbagai negara di dunia atas rekomendasi *Bank for International Settlements (BIS)*, hal ini dapat dilihat pada *BIS Papers No. 1(part 10) – march 2001* untuk Hongkong. Dan *BIS Policy Papers – Bank restructuring in practice – Sep 1999*, untuk Bank Negara Malaysia BoT Bank of Thailand. Serta *Ms. Phillips discusses trends and challenges in Federal Reserve bank supervision (Central Bank Articles and Speeches, 30 Oct 97)*, yang pada intinya menyimpulkan bahwa penilaian

- dengan *CAMEL* masih relevan, hanya perlu direvisi dengan adanya perkembangan jaman, dimana ditambahkan S atau *Sensitivity to market*.
2. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan bank-bank di Indonesia, juga secara rutin melakukan penilaian kesehatan seluruh perbankan di Indonesia dengan sistem *CAMEL*, hanya saja penilaian dilakukan dengan pembobotan unsur *CAMEL* dan masih bersifat rahasia sehingga tidak dapat diketahui oleh masyarakat umum. UU RI No. 23, tahun 1999, Tentang Bank Indonesia, pasal 30, ayat (2); menyatakan bahwa "pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan data yang diperoleh dalam pemeriksaan".
 3. BPR sendiri secara rutin telah melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatannya dengan menggunakan sistem *CAMEL* sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh BI sebagai bank sentral walaupun bersifat intern. SE BI No. 30/3/UPPB Tanggal 30 April 1997; Tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR.
 4. Roberto Bonfatti, 1999, dalam penelitiannya pada ***Bank of America Corporation (BoAC)***, dengan memberikan skor pada masing-masing komponen *CAMELS* (*grade*; 1 = kuat, 2 = cukup kuat, 3 = Sedang, 4 = kurang kuat, 5 = tidak kuat) menarik kesimpulan sebagai berikut; Bahwa seluruh skor *CAMELS* yang diberikan untuk *Bank of American Corporation* adalah 2 (Rata-rata skor untuk enam komponen *CAMELS* adalah 1,8). Dengan rincian bahwa BoAC memiliki struktur permodalan yang kuat (skor = 1) dan profitabilitas yang cukup memuaskan (skor = 2), selain itu, Manajemen BoAC telah terbukti selama 10 tahun mampu mengantarkan BoAC sebagai bank raksasa di Amerika yang pertumbuhan assetnya secara berkelanjutan. Walaupun demikian BoAC kemungkinan akan memiliki beberapa permasalahan dalam likuiditas (skor = 3) di masa-masa yang akan datang, terutama bila perkiraan terhadap penanganan risiko pasar (skor = 2) didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru, lebih jauh lagi kualitas asset bisa turun padal level di bawah yang wajar (layak diterima).

Empat penelitian terdahulu tersebut di atas rata-rata melakukan penilaian bank secara individu, yang sifatnya melakukan pengukuran nilai TKS pada masing-masing bank yang diteliti. Disamping itu penelitian terdahulu lebih banyak dilakukan pada bank-bank umum, dan hanya sebagian kecil yang dilakukan pada BPR. Sehingga dalam penelitian ini nantinya mencoba meneliti BPR yang ada di Jawa Timur, namun tidak menilai atau mengukur nilai tingkat kesehatan BPR. Tetapi melihat faktor-faktor finansial yang mempengaruhi nilai dari tingkat kesehatan BPR dalam suatu periode tertentu, serta menentukan faktor dominan yang menentukan TKS BPR di Jawa Timur. Adapun faktor manajemen secara tersirat sebagian besar telah terwakili dari faktor-faktor finansial yang diteliti, sehingga dalam penelitian ini nantinya tidak dimasukkan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tingkat kesehatan BPR.





BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**3.1 Kerangka Konseptual Penelitian**

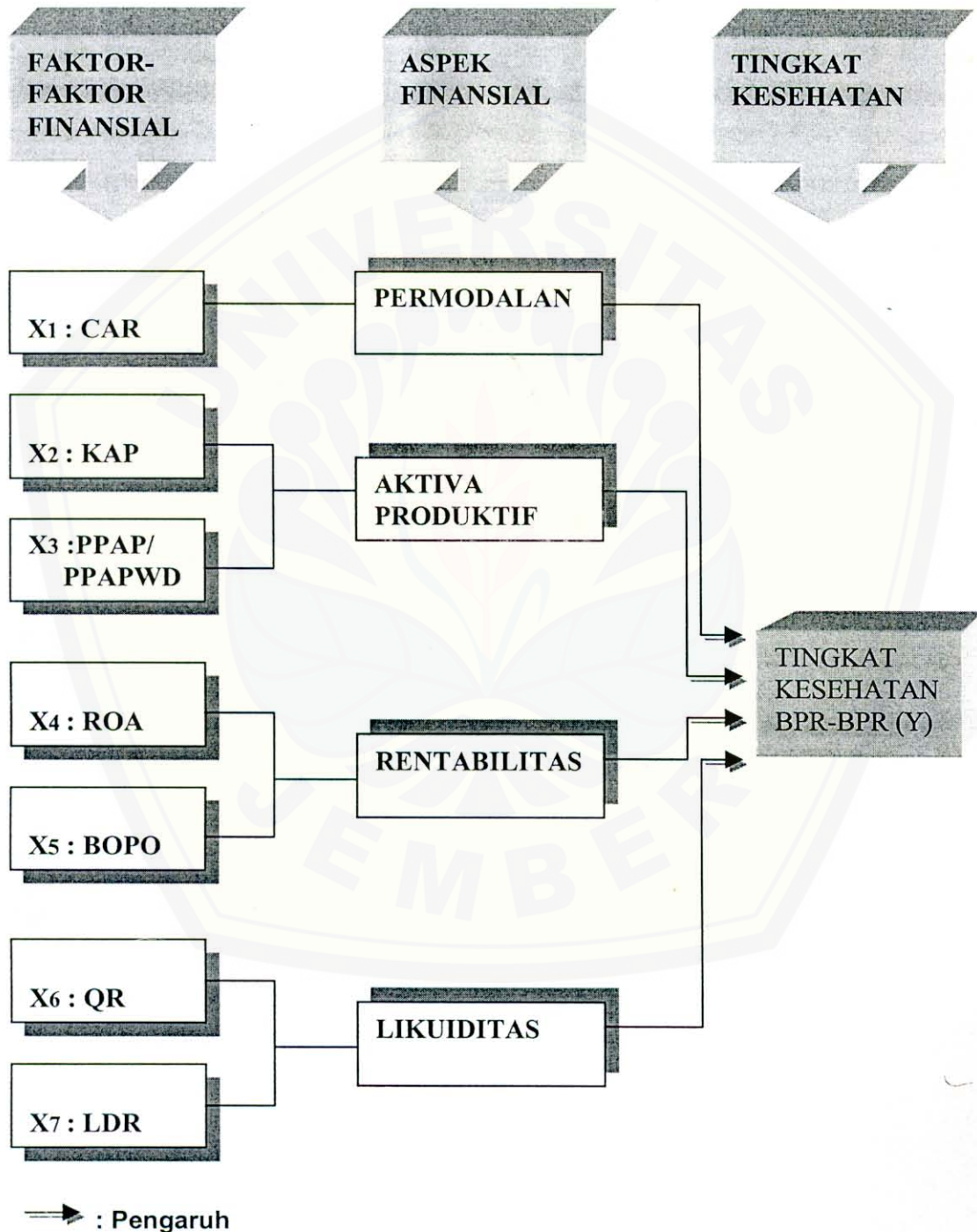
Dalam menentukan tingkat kesehatan suatu bank, pada awalnya Bank Indonesia menilai atas dasar tiga kelompok faktor penilaian (Widjanarto, 1993, 98), yaitu :

1. Keadaan keuangan bank, yang meliputi likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas.
2. Kualitas aktiva produktif, yaitu kekayaan bank berupa penanaman dalam berbagai aktiva yang diharapkan dapat memberikan penghasilan pada bank.
3. Tata kerja serta kepatuhan bank terhadap peraturan-peraturan terutama yang berkaitan dengan bidang perbankan.

Dengan demikian, cara penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia adalah sistem *CAMEL* plus, yang artinya ada faktor-faktor non keuangan yang ikut mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

Tingkat kesehatan bank (TKS) BPR adalah muara yang akan di tuju dalam penelitian ini. Karena berangkat dari kondisi riil finansial BPR sehingga teori mengenai faktor *CAMEL* plus, tidak secara keseluruhan diteliti, dimana unsur manajemen dan kepatuhan terhadap aturan, atau mungkin ada faktor lainnya yang mempengaruhi TKS BPR tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Faktor-faktor finansial menunjukkan objektivitas dalam penilaian dari sisi kinerja keuangan suatu bank, sedangkan manajemen sendiri dapat terwakili dari kinerja keuangan tersebut. Oleh karena itu dalam kerangka konseptual aspek manajemen dan aspek kepatuhan lainnya tidak dipertimbangkan. Merupakan suatu hal yang lebih objektif dalam penilaian tingkat kesehatan BPR yang akan diungkap dalam penelitian ini karena merupakan hasil kinerja finansial dan kerangka konseptual yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 3.1 halaman 39 berikut ini.

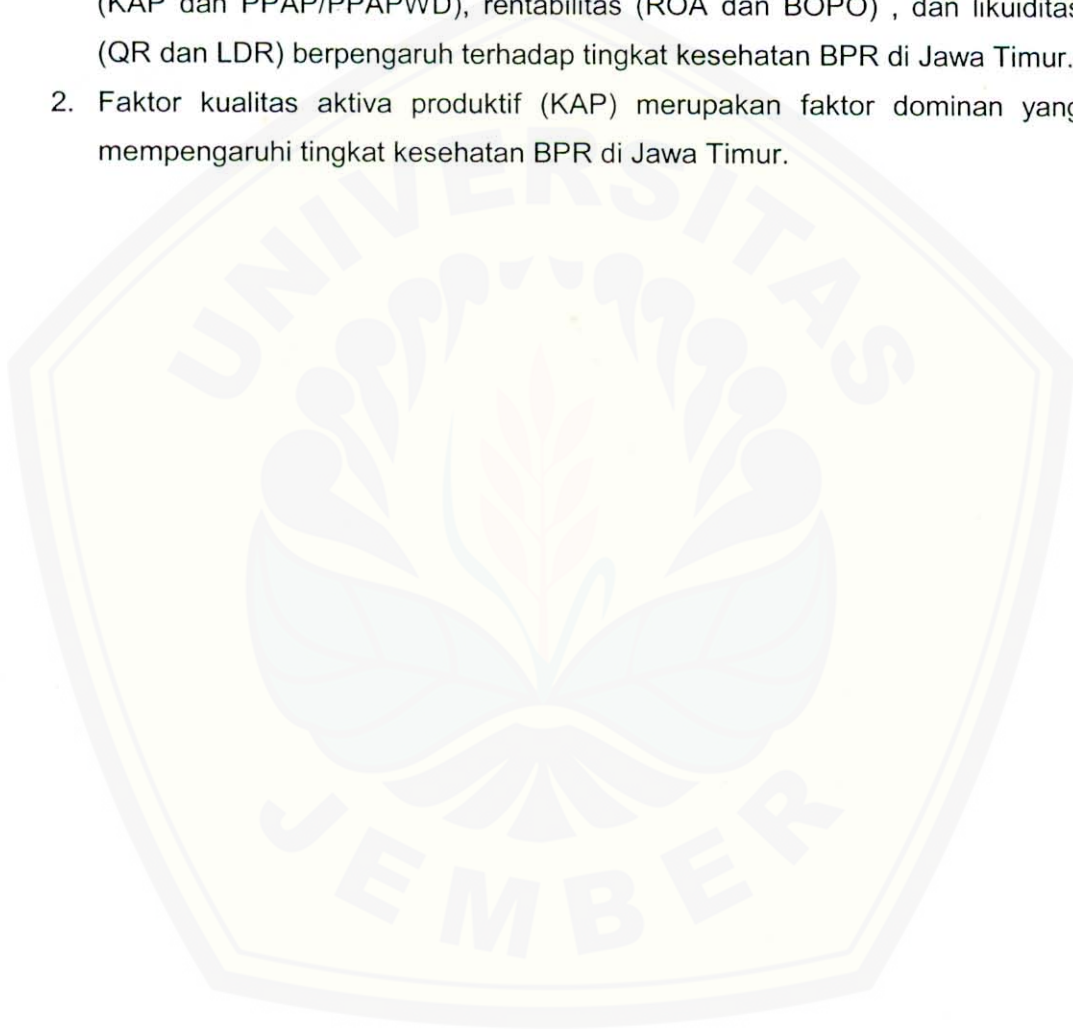
Gambar 3.1 KERANGKA KONSEPTUAL



3.2 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan penelitian, dan landasan teori, serta penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Faktor-faktor finansial berupa permodalan (CAR), kualitas aktiva produktif (KAP dan PPAP/PPAPWD), rentabilitas (ROA dan BOPO) , dan likuiditas (QR dan LDR) berpengaruh terhadap tingkat kesehatan BPR di Jawa Timur.
2. Faktor kualitas aktiva produktif (KAP) merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kesehatan BPR di Jawa Timur.





BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara *Cross Sectional* di mana informasi dikumpulkan dari sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan jumlah populasi yang cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, serta terbatasnya waktu, tenaga dan dana. Namun hal itu dapat didukung oleh jenis populasi yang cukup homogen. Penelitian ini juga merupakan penelitian *ex post facto* yakni peristiwa yang telah terjadi, dalam hal ini data mengenai aktivitas BPR-BPR yang telah dilakukan (*historical data*) dengan merunut ke belakang guna mengetahui faktor yang dapat mengakibatkan timbulnya suatu kejadian yakni untuk mengetahui hubungan (korelasi) antara variabel terikat (*dependent variable*), yaitu Tingkat Kesehatan BPR dengan variabel bebas (*independent variable*) berupa, Permodalan, Kualitas aktiva produktif, Rentabilitas, dan Likuiditas. Hal ini senada dengan pendapat yang menyatakan bahwa rancangan penelitian *ex post facto* adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut (Sugiyono, 1993; 25).

4.1 Obyek Penelitian

Obyek penelitian di sini adalah BPR yang berlokasi di Jawa Timur. Jumlah BPR yang beroperasi di Jawa Timur menurut Bank Indonesia Surabaya sampai akhir Januari 2001 sebesar 430 bank (Surya, April 2001) yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Timur. Dengan kondisi perekonomian terkini, obyek penelitian ini sangat menarik dan bermanfaat untuk diteliti.

4.2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh BPR yang ada di Jawa Timur (BPR). Jumlah populasi adalah 430 unit BPR yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Timur. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih secara cermat untuk mewakili populasi (Emory dan Cooper, 1997; 169). *Sample design* sendiri adalah suatu rencana mengenai cara pengambilan sampel dari populasi yang ditentukan

(Djarwanto dan Subagyo, 1994; 116). Rancangan pengambilan sampel pada dasarnya ada dua (Faisal, S, 2001;58), yaitu; (1) Rancangan sampel probabilitas atau *probability sampling design*, dan (2) Rancangan sampel non-probabilitas atau *nonprobability sampling design*. Rancangan sampel probabilitas disebut juga dengan rancangan sampel secara random, yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Dikatakan sampel probabilitas karena unit-unit sampelnya (n) diambil atau dipilih dengan mengikuti hukum probabilitas.(Faisal, S, 2001;58)

Mengingat populasi yang cukup homogen (industri perbankan) sehingga teknik pengambilan sampel di sini menggunakan teknik random sederhana (simple random sampling), yang mengambil sampel secara acak sesuai yang dibutuhkan. (Faisal, S, 2001;59). Untuk pengambilan sampel dalam penelitian, dilakukan dengan jalan undian. Masing-masing warga populasi (nama BPR) ditulis di sehelai guntingan kertas, kemudian digulung sehingga tidak terlihat tulisannya. Dari 430 gulungan tadi lalu dikocok, selanjutnya diambil satu per satu sampai mencapai jumlah 50 (lima puluh) BPR yang tertera namanya pada 50 (lima puluh) gulungan kertas yang terambil tadi, merupakan warga populasi yang terpilih sebagai sampel penelitian.

Pada penelitian ini ditetapkan jumlah sampel sebesar 50 (lima puluh) unit BPR yang kebetulan tersebar di seluruh wilayah atau karesidenan yang ada di Jawa Timur. Adapun BPR yang telah ditarik secara acak untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1, halaman 43 dan 44.

4.3 Identifikasi Variabel

Berdasarkan pada rumusan masalah dan hipotesis sebelumnya, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. **Variabel terikat (*dependent variable*)**, yaitu variabel yang menunjukkan hasil penilaian kinerja dan pengelolaan BPR, yang dinyatakan dengan Tingkat Kesehatan (TKS). Berdasarkan nilai kinerja (nilai 0 -100) dan pengelolaan secara keseluruhan ditetapkan 4 (empat) kriteria golongan bank menurut tingkat kesehatannya.
2. **Variabel bebas (*independent variable*)**, variabel ini terdiri dari variabel-variabel berupa, Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Rasio*), Rasio kualitas aktiva produktif (KAP), Rasio pencadangan penghapusan aktiva

produktif (PPAP/PPAPWD), Rasio pengembalian terhadap asset (ROA), dan Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi (BOPO), Rasio likuiditas (QR), Rasio baki debit pinjaman terhadap simpanan (LDR).

Tabel 4.1

**Daftar Bank Perkreditan Rakyat Yang Dijadikan Obyek Penelitian
Berdasarkan Teknik Random Sederhana di Jawa Timur**

No.	Bank Perkreditan Rakyat	Wilayah BI/Karesidenan
1.	PT. BPR DNM	Surabaya
2.	PT. BPR JLT	Sidoarjo/Surabaya
3.	KBPR BJY	Mojokerto/Surabaya
4.	PT. BPR AWS	Surabaya
5.	PT. BPR SDB	Sidoarjo/Surabaya
6.	PT. BPR TDN	Sidoarjo/Surabaya
7.	PT. BPR DMM	Sidoarjo/Surabaya
8.	PT. BPR SDT	Surabaya
9.	PT. BPR WDP	Sidoarjo/Surabaya
10.	PT. BPR ADS	Gresik/Surabaya
11.	PT. BPR AHP	Mojokerto/Surabaya
12.	KBPR BMA	Jombang/Surabaya
13.	PT. BPR SSD	Sidoarjo/Surabaya
14.	PT. BPR GNR	Dinoyo/Malang
15.	PT. BPR ASP	Pasuruan/Malang
16.	PT. BPR DNL	Kepanjen/Malang
17.	PT. BPR SMP	Dampit/Malang
18.	PT. BPR BMR	Kepanjen/Malang
19.	KBPR KMD	Pasuruan/Malang
20.	PT. BPRS DAM	Pasuruan/Malang
21.	PT. BRJ	Batu/Malang
22.	PT. BPR DKM	Batu/Malang

23.	PT. BPR APW	Pasuruan/Malang
24.	PT. BPR SMS	Probolinggo/Malang
25.	PT. BPR BRJ	Probolinggo/Malang
26.	KBPR JTS	Ponorogo/Kediri
27.	KBPR TKR	Magetan/Kediri
28.	KBPR ANG	Purwosari/Kediri
29.	PT. BPR HNM	Pare/Kediri
30.	PT. BPR TJT	Pare/Kediri
31.	KBPR KST	Magetan/Kediri
32.	PT BPR EDB	Magetan/Kediri
33.	KBPR AKC	Madiun/Kediri
34.	PT. BPR NNA	Tulungagung/Kediri
35.	PT. BPR SAY	Blitar/Kediri
36.	PT BPR KSA	Nganjuk/Kediri
37.	KBPR ANW	Madiun/Kediri
38.	KBPR EKU	Tanggul/Jember
39.	PT. NMB	Ambulu/Jember
40.	PT. BPR SWA	Jember
41.	PT. BPR NSI	Jember
42.	PT BPR RBN	Jember
43.	PT. BPR BIM	Banyuwangi/Jember
44.	KBPR TMM	Tanggul/Jember
45.	PT. BPR PJR	Jember
46.	PT. BPR PHL	Banyuwangi/Jember
47.	PT BPR YKJ	Lumajang/Jember
48.	PT. BPR BAG	Jember
49.	PT. BPR BHP	Jember
50.	PT. BPR BBM	Banyuwangi/Jember

Sumber: PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Surabaya, Mei 2002.

4.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini nantinya berupa variabel terikat dan variabel bebas yang dapat dioperasionalkan sesuai dengan definisi sebagai berikut.

1. Variabel Terikat (*dependent variabel*).

Tingkat Kesehatan bank merupakan hasil penilaian kinerja dan pengelolaan bank yang bersangkutan dalam suatu periode tertentu (nilai 0 – 100). Berdasarkan kinerja dan pengelolaan secara keseluruhan ditetapkan 4 (empat) kriteria golongan bank menurut tingkat kesehatannya sebagai berikut.

Tabel 4.2
Nilai Variabel Terikat (TKS)

No.	Tingkat Kesehatan	Nilai
1	Sehat	81 < 100
2	Cukup Sehat	66 < 80
3	Kurang Sehat, dan	51 < 65
4	Tidak Sehat	0 < 50

Sumber : SK Dir. BI No.30/11/KEP/DIR, 1997, Psl;13, ayat (3)

2. Variabel Bebas (*independent variable*)

- a. **Rasio kecukupan modal (CAR)**, adalah perbandingan modal suatu bank terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dari bank bersangkutan dalam suatu periode tertentu. Dinyatakan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

- b. **Rasio kualitas aktiva produktif (KAP)**, adalah perbandingan aktiva produktif bank yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif bank yang bersangkutan dalam suatu periode tertentu. Dinyatakan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{KAP} = \frac{\text{AP. Yang Diklasifikasikan}}{\text{Total Aktva Produktif (AP)}} \times 100 \%$$

- c. **Rasio pencadangan penghapusan AP (PPAP/PPAPWD)**, adalah perbandingan pencadangan penghapusan aktiva produktif yang ada pada bank terhadap pencadangan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh bank bersangkutan dalam suatu periode tertentu. Dinyatakan dalam formula sebagai berikut:

$$\text{PPAP/PPAPWD} = \frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100 \%$$

- d. **Rasio Keuntungan terhadap asset (ROA)**, adalah perbandingan keuntungan bank setelah pajak terhadap total asset yang dimiliki oleh bank bersangkutan dalam suatu periode tertentu. Dinyatakan dalam formula sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

- e. **Rasio biaya terhadap pendapatan (BOPO)**, adalah perbandingan biaya operasional bank terhadap pendapatan operasional bank yang bersangkutan dalam suatu periode tertentu. Dinyatakan dalam formula sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

- f. **Rasio Likuiditas (QR)**, adalah perbandingan kas (termasuk yang ada di bank) terhadap total dana pihak ketiga bank yang bersangkutan dalam suatu periode tertentu. Dinyatakan dalam formula sebagai berikut:

$$QR = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

- g. **Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (LDR)**, adalah perbandingan baki debit pinjaman bank terhadap dana pihak ketiga bank yang bersangkutan dalam suatu periode tertentu. Dinyatakan dalam formula sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Baki Debet Pinjaman}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga} + \text{Hutang JP}} \times 100 \%$$

4.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di wilayah Jawa Timur yang meliputi 4 (empat) wilayah kerja Bank Indonesia atau karesidenan, yaitu:

1. Wilayah kerja BI Surabaya
2. Wilayah kerja BI Malang
3. Wilayah kerja BI Kediri, dan
4. Wilayah kerja BI Jember.

Adapun rencana penelitian menggunakan data akhir tahun 1999 sampai dengan akhir tahun 2001 (tiga tahun takwim/buku) Tahun 1999 – 2001 merupakan masa pemulihan krisis perbankan di Indonesia.

4.6 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. **Studi kepustakaan**, yakni memperoleh data skunder berupa statistik perbankan, laporan keuangan, literatur, jurnal-jurnal yang dipublikasikan, laporan hasil penelitian sebelumnya, serta berbagai sumber media lainnya termasuk sumber dari instansi dan lembaga pendidikan maupun lembaga keuangan yang terkait dengan obyek penelitian.
2. **Studi lapangan**, yakni langsung mendatangi obyek penelitian (masing-masing BPR) untuk memperoleh data skunder berupa lapbul (laporan bulanan) akhir tahun buku 1999-2001 dan hasil akhir nilai tingkat kesehatan

intern Bank Perkreditan Rakyat bersangkutan untuk akhir buku 1999 sampai dengan 2001.

4.7 Alat atau Instrumen Penelitian

Dalam penelitian menggunakan alat ataupun instrumen berupa Tabulasi Data (*Form Documentation*) dalam melakukan pengumpulan data, sebab data yang diperlukan merupakan data skunder yang telah diolah oleh BPR-BPR bersangkutan berupa laporan bulanan akhir tahun (neraca, laba/rugi, dan laporan lainnya), kemudian diolah lebih lanjut dan laporan hasil akhir penilaian intern tingkat kesehatan (TKS) BPR-BPR tersebut. Sehingga dalam pengumpulan data peneliti langsung kepada masing-masing obyek yang diteliti.

4.8 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan adalah analisis rasio dan analisis statistik inferensial sebagai berikut.

4.8.1 Teknik Analisis Data

- a. Analisis rasio finansial untuk menentukan besaran (nilai) dari variabel-variabel bebas yang akan diteliti, meliputi analisis *common size* dan *trend analysis* atau statistik deskriptif.
- b. Analisis statistik inferensial dengan menggunakan *Multiple Regression Analysis*, untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Dengan formula sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + \beta_7X_7 + e$$

Dimana :

Y = Tingkat Kesehatan

β_0 = Konstanta

β_{1-7} = Koefisien X_{1-7}

X_1 = CAR

X_2 = KAP

X_3 = PPAP/PPAPWD

X_4 = ROA

X_5 = BOPO

X_6 = QR

X_7 = LDR

e = Faktor Pengganggu (Standard Error)

4.8.2 Uji Hipotesis

Adapun untuk masing-masing hipotesis alat analisis yang dipergunakan adalah:

1. Untuk hipotesa 1 (satu) dilakukan dengan uji F (F test) yaitu uji koefisien regresi secara simultan, dengan tahap uji sebagai berikut (Subagyo, 1994; 189).

- a. Merumuskan hipotesis:

Ho: $b_{1-7} = 0$, secara simultan tidak ada pengaruh variabel X_{1-7} terhadap variabel Y.

Ha: $b_{1-7} \neq 0$, secara simultan ada pengaruh yang signifikan dari variabel X_{1-7} terhadap variabel Y atau paling tidak, ada sebuah koefisien regresi yang $\neq 0$.

- b. Menentukan derajat signifikansi (α) dalam penelitian ini ditetapkan besarnya $\alpha = 5\%$.
- c. Menghitung nilai F dengan formula:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana:

R^2 : Koefisien determinasi

n : Jumlah observasi

k : Jumlah variabel bebas

- d. Membuat keputusan hipotesis dengan membandingkan nilai F hitung dengan F Tabel pada $\alpha = 5\%$ dan derajat bebas, $(k-1)(n-k)$.
- e. -Bila F hitung $>$ F Tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.
-Bila F hitung $<$ F Tabel, Maka Ho diterima dan Ha ditolak.
2. Untuk hipotesa 2 (dua) dilakukan dengan uji t (t test) guna menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial, sehingga dapat

diketahui signifikansi masing-masing variabel. Dengan tahap uji sebagai berikut.

a. Merumuskan hipotesis:

Ho: $b_{1-7} = 0$, Secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y.

Ha: $b_{1-7} \neq 0$, Secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y.

b. Menentukan nilai kritis pengujian dengan memperhatikan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$.

c. Menentukan t hitung dengan formula:

$$t \text{ hitung} = \frac{b_i - \beta_i}{S_b}$$

Dimana:

β_i = Koefisien regresi X_i

S_b = Simpangan baku dari koefisien regresi.

d. Membuat keputusan hipotesis dengan membandingkan nilai t hitung dengan t Tabel pada $\alpha = 5\%$ dan derajat bebas, $(k-1)(n-k)$.

e. -Bila t hitung $>$ t Tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima (signifikan)

-Bila t hitung $<$ t Tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak signifikan)

f. Dari koefisien regresi yang signifikan dilakukan penentuan variabel mana paling dominan pengaruhnya terhadap variabel terikat dengan membandingkan diantara masing-masing koefisien Beta, menguji kesamaan dua koefisien regresi secara berurutan sebagai berikut:

g. Merumuskan hipotesis:

Ho: $b_{1-7} \neq b_{1-7}$, Tidak ada perbedaan antara koefisien regresi signifikan yang diperbandingkan..

Ha: $b_{1-7} = b_{1-7}$, Ada perbedaan antara koefisien regresi signifikan yang diperbandingkan.

h. Menentukan nilai kritis pengujian dengan memperhatikan tingkat signifikansi (α) dan *degree of freedom* (df) = $n - 1$. Dalam penelitian ini $\alpha = 5\%$ (two-tail = 2,5%).

i. Menentukan t hitung dengan formula:

$$t_{b1,b2} = \frac{b1 - b2}{\sqrt{\text{Var } b1 + \text{Var } b2 - 2\text{Covar } b1b2}}$$

- j. Membuat keputusan hipotesis dengan membandingkan nilai t hitung dengan t Tabel pada $\alpha = 5\%$ dan derajat bebas, $(k-1)(n-k)$.
- k. -Bila t hitung > t Tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
-Bila t hitung < t Tabel, Maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- l. Setelah masing-masing koefisien regresi yang signifikan telah diuji kesamaan dua koefisien dan terbukti ada perbedaan koefisien regresi, baru dapat dibandingkan mana yang paling besar nilai koefisien Betanya yang merupakan variabel bebas paling dominan mempengaruhi variabel terikat.

4.8.3 Uji Asumsi-Asumsi Klasik

Dalam menggunakan model regresi linier, perlu diperhatikan adanya pengujian asumsi klasik terhadap model yang akan digunakan dengan uji ekonometri atau uji diagnostik, karena pada hakekatnya jika asumsi-asumsi dalam uji ini dipenuhi, maka akan didapatkan penaksir-penaksir yang BLUE (*Best, Linier, Un-biased, Estimator*) dengan prosedur OLS (*Ordinary Least Square*). Sehingga untuk memperoleh nilai pemerkiraan yang demikian dari persamaan regresi berganda dengan metode OLS tersebut, maka dalam pelaksanaan analisis data haruslah memenuhi asumsi-asumsi klasik. Terdapat 4 (empat) asumsi yang harus dipenuhi yaitu (Gujarati, 1999, 38):

1. Uji Multikolinierity

Istilah multikolinierity pada awalnya diciptakan oleh Ragnar Frish yang mempunyai arti adanya hubungan linier yang sempurna diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi (Supranto, 1984, 23). Uji multikolinierity

dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinierity dalam model regresi linier berganda dapat dilihat dalam 3 (tiga) kondisi yang harus dipenuhi, yaitu (a) nilai R cukup tinggi, (b) koefisien korelasi sederhana (*zero order coefficient of correlation*) juga tinggi, dan (c) tidak satupun atau sedikit sekali koefisien regresi parsial yang signifikan secara individu kalau dilakukan uji t (Supranto, 1984, 27). Multikolinierity akan menjadi masalah jika derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi berganda diantara seluruh variabel secara serentak. Dengan kata lain, multikolinieritas cukup berbahaya dan merugikan jika:

$$r^2_{x_{jji}} > R_{x_1, x_2, \dots, x_k}$$

2. Uji Heteroscedasticity

Uji heteroscedasticity adalah suatu keadaan yang masing-masing kesalahan pengganggu mempunyai varian yang berlainan, yaitu:

$$\text{Var}(\epsilon_i) = \sigma^2 \text{ untuk } i = 1, 2, \dots, n$$

Dan jika $i = j$

Uji heteroscedasticity dimaksudkan untuk menguji apakah varian dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua nilai variabel bebas, yaitu $E(X_i, \epsilon_j) = 0$, sehingga $E(\epsilon_j)^2 = 0$. Tak terpenuhinya asumsi homoskedastis (atau terjadinya keadaan heteroskedastis), yaitu sama atau konstannya varians dari *disturbance* ϵ_i , menyebabkan estimator yang dihasilkan (koefisien variabel bebasnya) tidak efisien, yang berarti varians-nya tidak minimum. Salah satu cara mendeteksi ada/tidaknya masalah heteroskedastis adalah dengan melihat *residual plot* dari persamaan garis regresinya, yakni memetakan $(\epsilon_i)^2$ (kuadrat residual dari regresi) terhadap salah satu variabel bebas dalam model. Apabila *residual plot* yang terjadi tidak menggambarkan adanya pola tertentu, berarti bersifat random, maka dapat dikatakan bahwa model yang digunakan adalah memenuhi asumsi homoskedastis.

3. Uji Autocorrelation

Istilah autocorrelation menurut Maurice G Kendall dan William R Buckland adalah korelasi antara anggota seri observasi yang disusun menurut urutan waktu (seperti data *time series*) atau menurut urutan tempat (seperti pada data cross section) atau korelasi pada dirinya sendiri (Supranto, 1984, 19). Dan untuk simbol dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$E(e_i, e_j) = 0, \quad i \neq j$$

Untuk mengetahui ada tidaknya otokorelasi pada persamaan penduga dapat dilihat dari nilai hitung Durbin-Watson Test yang dibandingkan nilai tabel dari Durbin-Watson Test.

4. Uji Kenormalan

Regresi linier normal klasik mengasumsikan bahwa tiap U_i didistribusikan secara normal dengan:

$$\text{Rata-rata} \quad : E(U_i) = 0$$

$$\text{Varians} \quad : E(U_i^2) = \sigma^2$$

$$\text{Kovarians} \quad : E(U_i U_j) = 0, \quad i \neq j$$

Asumsi ini secara ringkas bisa dinyatakan sebagai:

$$U_i \sim N(0, \sigma^2)$$

Dimana:

\sim berarti "didistribusikan sebagai" dan dimana N berarti "distribusi normal", unsur dalam tanda kurung menyatakan dua parameter distribusi normal, yaitu rata-rata dan varians. Untuk dua variabel yang didistribusikan secara normal kovarians atau korelasi nol dari distribusi normal, yaitu rata-rata dan varians. Untuk dua variabel yang didistribusikan secara normal kovarians atau korelasi nol dua variabel tadi independen (bebas). Jadi, dengan asumsi kenormalan berarti bahwa U_i dan U_j tidak hanya tak berkorelasi tetapi juga didistribusikan secara bebas (*independent*).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan analisis, seperti yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab sebelumnya, selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

6.1.1 Sesuai Dengan Tujuan Satu Penelitian

- a. Dengan uji F (F-test) hipotesis pertama yang diajukan dapat dibuktikan, namun hanya ada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) faktor-faktor finansial yang meliputi Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Biaya Operasional dibagi Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap nilai tingkat kesehatan BPR di Jawa Timur.
- b. Ketiga faktor finansial berupa KAP, BOPO, LDR, sama-sama memiliki pengaruh negatif terhadap variansi perubahan nilai TKS BPR di Jawa Timur.
- c. Walaupun hanya ada 3 (tiga) faktor finansial yang signifikan yaitu; KAP, BOPO, dan LDR, namun ketiga faktor finansial tersebut telah membawa karakter 4 (empat) faktor finansial lainnya dalam penelitian ini, berupa; Capital Adequacy Ratio (CAR), PPAP/PPAPWD, Return on Asset (ROA), dan Quick Ratio (QR).
- d. Faktor-faktor finansial yang signifikan mempunyai hubungan sebesar 72,1 % terhadap tingkat kesehatan (TKS) sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Multiple R pada lampiran 15 dan mampu menjelaskan variansi nilai tingkat kesehatan BPR sebesar 51,9 % sebagaimana ditunjukkan oleh nilai determinansi R square (R^2). Dengan demikian nilai tingkat kesehatan BPR lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor finansial.
- e. Nilai R-Square yang hanya 51,9 % memberikan petunjuk bahwa nilai tingkat kesehatan BPR tidak sepenuhnya hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor finansial yang ada dalam penelitian ini dan juga bisa dilihat faktor-faktor finansial lainnya maupun faktor-faktor non finansial seperti manajemen.



6.1.2 Sesuai Dengan Tujuan Kedua Penelitian

- a. Dengan uji t (t-test) diketahui bahwa 3 (tiga) dari 7 (tujuh) faktor-faktor finansial yang diuji dalam penelitian ini berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap nilai tingkat kesehatan BPR, ketiga faktor-faktor finansial di atas berpengaruh secara negatif terhadap nilai tingkat kesehatan BPR di Jawa Timur.
- b. Dari hasil uji t (t-test) untuk kesamaan dua koefisien regresi dapat dibuktikan bahwa diantara masing-masing koefisien regresi yang signifikan tidak terdapat kesamaan dua koefisien, sehingga dapat dibandingkan untuk menentukan mana yang paling dominan.
- c. Dari hasil uji t (t-test) hipotesis kedua yang diajukan dapat dibuktikan, bahwa variabel Kualitas Aktiva Produktif (KAP) mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variansi perubahan nilai tingkat kesehatan BPR di Jawa Timur.

6.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan membuat kesimpulan, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut:

- a. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak keterbatasan baik dari segi alat analisis, ruang lingkup, populasi dan sampel yang menjadi obyek penelitian sehingga hasil yang diperoleh masih jauh dari sempurna. Dalam penelitian ini yang diamati hanya 7 (tujuh) faktor finansial yang berkaitan langsung dengan nilai tingkat kesehatan, padahal dimungkinkan adanya faktor-faktor finansial lainnya yang ikut mempengaruhi nilai dari tingkat kesehatan BPR di Jawa Timur. Peneliti lain dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan lebih banyak faktor-faktor finansial yang mungkin mempengaruhi nilai tingkat kesehatan BPR.
- b. Penelitian ini juga tidak melihat faktor-faktor non-finansial seperti manajemen, sebagai pengukuran tingkat kesehatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia saat ini (SK Direksi BI No. 30/12/KEP/DIR, 1997). Selain itu nilai tingkat kesehatan BPR juga mungkin bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, GNP(Gross National Product), kebijakan pemerintah dibidang ekonomi, tingkat bunga bank, dan kurs valuta asing. Peneliti lain dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan faktor-faktor non-finansial dan faktor-faktor makro ekonomi.

- c. Salah satu kelemahan dalam penelitian ini, karena faktor-faktor finansial yang dijadikan prediktor untuk melihat nilai tingkat kesehatan BPR adalah merupakan faktor-faktor finansial yang digunakan dalam mengukur nilai dari tingkat kesehatan itu sendiri, sehingga dapat dikatakan otomatis mempengaruhi nilai dari tingkat kesehatan BPR tersebut, walaupun dalam pengukurannya masih menggunakan dasar pembobotan. Namun penelitian ini sangat penting mengingat informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tingkat kesehatan suatu bank, khususnya BPR belum banyak dikenal oleh masyarakat umum. Dan terbukti pula secara statistik bahwa tidak semua faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur nilai tingkat kesehatan BPR berpengaruh secara signifikan.
- d. Sesuai dengan tujuan penelitian kedua bahwa kualitas aktiva produktif (KAP) sangat signifikan dan paling dominan mempengaruhi tingkat kesehatan (TKS) BPR di Jawa Timur. Maka, perlu adanya perhatian secara khusus oleh manajemen BPR dalam mengelola aktiva produktif yang dimiliki sehingga kualitas aktiva produktif tetap baik dan fungsi intermediasi bank juga berjalan dengan optimal atau *loan to deposit ratio (LDR)* tetap tinggi. BPR harus memiliki sistem dan prosedur standard dalam memberikan pinjaman, penilaian jaminan, pengawasan, dan *monitoring*, serta aspek legalitas harus kuat. Demikian juga halnya dengan pemeriksa maupun kreditur yang berkepentingan dengan BPR harus betul-betul obyektif dalam melihat kondisi kesehatan BPR, khususnya KAP BPR. Dan terakhir disarankan bahwa para manajer bank, khususnya BPR harus memiliki integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam mengelola bank atau BPR yang dikelolanya.

DAFTAR PUSTAKA

- American Institute of Banking, 1975, *Principles of Banking Operation*, Revised ed.
- Bank Indonesia, 1991, *Himpunan Ketentuan Lanjutan PAKTO 27, Oktober 1988 Tentang Penyempurnaan dan Pembinaan Bank*, 28 Februari 1991.
- Bank for International Settlements (BIS), 2001, *Search result 1-10 of 13 total result for CAMEL*, www.bis.co.id, 27 April 2001.
- Bambang S., 2000, *30 % BPR di Jatim diawasi intensif*, Dalam *Bisnis Indonesia*, 25 Juli, Jakarta.
- Djarwanto P.S, Subagyo P, 1994, *Statistik Induktif*, Edisi ke empat, cetakan kedua BPFE, Yogyakarta.
- Edward Djony, 2001, *Melecut Fungsi Intermediasi Perbankan*, Dalam *Bisnis Indonesia*, 28 Februari, Jakarta, Halaman III.
- Emory C.W. & Cooper D.R, 1997, *Metode Penelitian Bisnis*, Jilid 1, Edisi kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Estetiono, A., 1994, *Penerapan Profit Sensitivity Analysis Sebagai Metode Analisis Profitabilitas Bank "X"*, Skripsi, FE-Universitas Airlangga Surabaya.
- Faisal, Sanapiah, 2001, *Format-Format Penelitian Sosial*, Edisi kelima, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Firms Rating Model, 1997, *A New Monitoring System For Banking Institutions*.
- Gujarati.D & Zain, 1999, *Ekonometrika Dasar*, Cetakan keenam, Erlangga, Jakarta.
- Hempel, George H., Alan B. Coleman and Donald G.S, 1990, *Bank Management, Text and cases*, 3rd., John Wiley & Sons, New York.
- Lapoliwa, Kuswandi N, 1999, *Akuntansi Perbankan*, Jilid 1, Ed, kelima, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta.
- Mendenhall, Reinmuth, 1991, *Statistik Untuk Manajemen Dan Ekonomi*, Alih Bahasa, Prof. Dra. N. Soemartojo, Cetakan kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Muljono, Teguh Pudjo, 1993, *Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan*, Jambatan, Jakarta.

- Republik Indonesia, 1998, **Undang-Undang No. 10 Tentang Perbankan**, Jakarta, Pasal 1.
- Republic of Korea, *Economic Bulletin*, October 1996, **Bank Rating System in Korea**
- R. Alton Gilbert, Andrew P. Meyer, Mark D. Vaughan, August 2000, **The Role of CAMEL Downgrade Model in Bank Surveillance**, Federal Reserve Bank of St. Louis, Research Division.
- Ron Feldman (Senior Financial Analyst), Jasin Schmidt (Financial Analyst), January 1999, **What are CAMELS and Who Should Know ?**, Federal Reserve Bank of Minneapolis.
- Siamat, Dahlan, 1993, **Manajemen Bank Umum**, Intermedia, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Sjahputra Iman, S.H.,CN.,LL,M, Djohan Arif Drs. S.H.,Widjaja Amin, Drs.Ak.,MBA, 1998, **Peraturan Perundang-Undangan Perbankan di Indonesia tahun 1991 – 1997**, Harvarindo, Edisi kedua.
- Sugiyono, 1993, **Metode Penelitian Administrasi**, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Supranto, J, 1994, **Ekonometrika** buku I, II, LPFE-UI, Jakarta.
- Surya, Berita (fin), 2001, **Debitur BPR "Sedot" Kredit Rp. 4,486 Triliun**, *Harian Surya*, 26 April 2001, Halaman 5.
- Syahriel, Mochtar, 2000, **Rating 162 Bank**, Dalam *Majalah Info Bank*, Edisi No. 251, Juli 2000, Vol. XXII, Jakarta.
- Weston J. Fred & Brigham E.F, 1990, **Dasar-Dasar Manajemen Keuangan**, Jilid I, Alih Bahasa, Alfonsus Sirait, SE, M.Bus, Penerbit Erlangga,
- Widjanarto, **Hukum & Ketentuan Perbankan di Indonesia**, PT. Pustakan Utama, Grafiti, Jakarta, 1993.

**TABULASI DATA
TKS BPR SAMPEL DI JAWA TIMUR**

NO	NAMA BPR	TINGKAT KESEHATAN			RATA-RATA
		1999	2000	2001	
1	PT. BPR DNM	94,80	94,80	96,20	95,27
2	PT. BPR JLT	92,79	92,95	98,00	94,58
3	KBPR BTY	94,80	94,00	97,79	95,53
4	PT. BPR AWS	93,80	93,80	93,80	93,80
5	PT. BPR SDB	86,75	89,77	92,09	89,54
6	PT. BPR TDN	92,00	93,00	92,62	92,54
7	PT. BPR DMM	96,60	96,80	97,20	96,87
8	PT. BPR SDT	84,23	93,36	96,99	91,53
9	PT. BPR WDP	98,67	98,80	98,80	98,76
10	PT. BPR ADS	80,92	93,40	97,45	90,59
11	PT. BPR AHP	95,80	95,80	96,40	96,00
12	KBPR BMA	92,90	92,38	89,35	91,54
13	PT. BPR SSD	95,00	95,00	95,00	95,00
14	PT. BPR GNR	93,64	90,78	92,89	92,44
15	PT. BPR ASP	92,92	94,40	94,08	93,80
16	PT. BPR DNL	92,00	90,60	87,29	89,96
17	PT. BPR SMP	74,61	84,56	86,43	81,87
18	PT. BPR BMR	94,61	93,90	91,39	93,30
19	KBPR KMD	88,17	93,20	95,40	92,26
20	PT. BPRS DAM	94,20	93,02	75,66	87,63
21	PT. BRJ	82,85	89,36	92,14	88,12
22	PT. BPR DKM	92,31	94,80	89,12	92,08
23	PT. BPR APW	98,40	98,40	94,60	97,13
24	PT. BPR SMS	86,20	95,00	92,00	91,07
25	PT. BPR BRJ	74,83	82,17	93,59	83,53
26	KBPR JTS	80,74	86,26	91,78	86,26
27	KBPR TKR	88,76	93,86	89,87	90,83
28	KBPR ANG	74,61	88,50	91,77	84,96
29	PT. BPR HNM	87,71	95,11	96,96	93,26
30	PT. BPR TJT	81,87	84,35	86,60	84,27
31	KBPR KST	92,33	91,83	89,88	91,35
32	PT BPR EDB	93,00	96,60	94,60	94,73
33	KBPR AKC	92,33	92,33	92,33	92,33
34	PT. BPR NNA	94,80	96,42	94,49	95,24
35	PT. BPR SAY	77,62	89,36	89,86	85,61
36	PT BPR KSA	89,94	90,60	89,73	90,09
37	KBPR ANW	96,80	97,00	96,80	96,87
38	KBPR EKU	85,00	88,00	91,00	88,00
39	PT. NMB	91,07	91,15	86,22	89,48
40	PT. BPR SWA	94,67	90,53	92,41	92,54
41	PT. BPR NSI	70,06	89,10	94,02	84,39
42	PT BPR RBN	94,40	96,35	96,17	95,64
43	PT. BPR BIM	87,71	95,11	96,96	93,26
44	KBPR TMM	91,04	91,81	92,40	91,75
45	PT. BPR PJR	94,46	98,20	98,20	96,95
46	PT. BPR PHL	91,70	93,70	95,47	93,62
47	PT BPR YKJ	80,42	68,88	89,17	79,49
48	PT. BPR BAG	91,30	89,54	92,69	91,18
49	PT. BPR BHP	81,02	97,74	89,41	89,39
50	PT. BPR BBM	86,40	92,55	93,23	90,73
RATA-RATA PER TAHUN		89,07	92,18	92,77	

TABULASI DATA
RASIO KAP BPR SAMPEL DI JAWA TIMUR

NO	NAMA BPR	KAP			RATA-RATA
		1999	2000	2001	
1	PT. BPR DNM	0,40%	0,80%	0,62%	0,61%
2	PT. BPR JLT	6,70%	4,70%	4,69%	5,36%
3	KBPR BTY	6,90%	5,20%	4,15%	5,42%
4	PT. BPR AWS	1,50%	1,10%	0,99%	1,20%
5	PT. BPR SDB	5,50%	3,40%	2,98%	3,96%
6	PT. BPR TDN	0,10%	1,80%	2,20%	1,37%
7	PT. BPR DMM	1,50%	0,60%	0,40%	0,83%
8	PT. BPR SDT	11,60%	0,90%	0,53%	4,34%
9	PT. BPR WDP	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%
10	PT. BPR ADS	19,70%	3,80%	3,74%	9,08%
11	PT. BPR AHP	0,80%	0,50%	0,52%	0,61%
12	KBPR BMA	3,40%	5,70%	2,99%	4,03%
13	PT. BPR SSD	2,50%	2,80%	0,22%	1,84%
14	PT. BPR GNR	6,00%	5,00%	4,13%	5,04%
15	PT. BPR ASP	7,30%	5,80%	4,06%	5,72%
16	PT. BPR DNL	8,90%	4,50%	8,36%	7,25%
17	PT. BPR SMP	12,60%	10,70%	10,38%	11,23%
18	PT. BPR BMR	3,90%	2,40%	5,61%	3,97%
19	KBPR KMD	14,30%	3,70%	0,00%	6,00%
20	PT. BPRS DAM	3,20%	7,00%	7,73%	5,98%
21	PT. BRJ	22,40%	7,70%	9,81%	13,30%
22	PT. BPR DKM	10,20%	5,40%	4,27%	6,62%
23	PT. BPR APW	0,90%	6,00%	2,94%	3,28%
24	PT. BPR SMS	9,40%	3,60%	2,71%	5,24%
25	PT. BPR BRJ	5,80%	9,10%	5,96%	6,95%
26	KBPR JTS	13,30%	10,20%	2,64%	8,71%
27	KBPR TKR	6,70%	3,20%	5,55%	5,15%
28	KBPR ANG	15,60%	5,90%	4,35%	8,62%
29	PT. BPR HNM	5,40%	4,00%	7,82%	5,74%
30	PT. BPR TJT	10,70%	8,90%	8,38%	9,33%
31	KBPR KST	5,70%	5,90%	5,61%	5,74%
32	PT BPR EDB	5,10%	1,80%	1,96%	2,95%
33	KBPR AKC	4,80%	2,20%	1,36%	2,79%
34	PT. BPR NNA	1,80%	0,20%	1,24%	1,08%
35	PT. BPR SAY	2,90%	3,90%	2,91%	3,24%
36	PT BPR KSA	4,70%	4,30%	1,89%	3,63%
37	KBPR ANW	1,20%	0,90%	0,29%	0,80%
38	KBPR EKU	8,30%	8,80%	3,70%	6,93%
39	PT. NMB	5,00%	5,30%	9,44%	6,58%
40	PT. BPR SWA	2,30%	8,20%	5,26%	5,25%
41	PT. BPR NSI	16,00%	7,70%	1,00%	8,23%
42	PT BPR RBN	2,80%	4,30%	1,30%	2,80%
43	PT. BPR BIM	3,50%	0,10%	0,21%	1,27%
44	KBPR TMM	11,00%	15,70%	6,29%	11,00%
45	PT. BPR PJR	11,00%	2,70%	0,00%	4,57%
46	PT. BPR PHL	3,70%	1,60%	1,68%	2,33%
47	PT BPR YKJ	4,60%	1,00%	0,41%	2,00%
48	PT. BPR BAG	2,60%	2,20%	1,72%	2,17%
49	PT. BPR BHP	15,40%	6,60%	7,02%	9,67%
50	PT. BPR BBM	10,20%	0,80%	1,05%	4,02%
	RATA-RATA PER TAHUN	6,80%	4,37%	3,46%	

**TABULASI DATA
CAR BPR SAMPEL DI JAWA TIMUR**

NO	NAMA BPR	CAR			RATA-RATA
		1999	2000	2001	
1	PT. BPR DNM	73,80%	61,20%	58,80%	64,60%
2	PT. BPR JLT	60,60%	46,70%	36,00%	47,77%
3	KBPR BTY	34,60%	31,80%	23,10%	29,83%
4	PT. BPR AWS	62,20%	51,30%	38,50%	50,67%
5	PT. BPR SDB	21,00%	19,50%	17,60%	19,37%
6	PT. BPR TDN	33,90%	37,80%	41,90%	37,87%
7	PT. BPR DMM	29,00%	29,10%	31,10%	29,73%
8	PT. BPR SDT	30,40%	31,30%	27,00%	29,57%
9	PT. BPR WDP	25,70%	27,80%	31,40%	28,30%
10	PT. BPR ADS	47,40%	33,40%	33,20%	38,00%
11	PT. BPR AHP	47,20%	35,80%	19,30%	34,10%
12	KBPR BMA	29,80%	22,50%	20,10%	24,13%
13	PT. BPR SSD	40,00%	44,40%	43,40%	42,60%
14	PT. BPR GNR	25,40%	20,00%	21,80%	22,40%
15	PT. BPR ASP	22,00%	20,40%	19,50%	20,63%
16	PT. BPR DNL	27,20%	20,00%	23,60%	23,60%
17	PT. BPR SMP	15,60%	17,00%	17,20%	16,60%
18	PT. BPR BMR	26,00%	17,50%	17,10%	20,20%
19	KBPR KMD	45,80%	40,90%	22,20%	36,30%
20	PT. BPRS DAM	18,20%	16,60%	26,70%	20,50%
21	PT. BRJ	40,30%	26,10%	18,00%	28,13%
22	PT. BPR DKM	26,20%	18,90%	11,50%	18,87%
23	PT. BPR APW	21,60%	26,30%	24,70%	24,20%
24	PT. BPR SMS	27,20%	31,40%	26,10%	28,23%
25	PT. BPR BRJ	51,10%	37,60%	25,60%	38,10%
26	KBPR JTS	30,60%	38,80%	31,70%	33,70%
27	KBPR TKR	33,70%	27,60%	26,10%	29,13%
28	KBPR ANG	22,60%	15,30%	23,70%	20,53%
29	PT. BPR HNM	31,60%	16,00%	18,10%	21,90%
30	PT. BPR TJT	17,80%	15,30%	12,60%	15,23%
31	KBPR KST	33,00%	24,40%	21,40%	26,27%
32	PT BPR EDB	20,50%	19,60%	16,80%	18,97%
33	KBPR AKC	22,40%	18,80%	18,30%	19,83%
34	PT. BPR NNA	31,30%	34,10%	31,40%	32,27%
35	PT. BPR SAY	48,10%	23,00%	21,50%	30,87%
36	PT BPR KSA	40,10%	40,20%	30,40%	36,90%
37	KBPR ANW	27,80%	20,20%	19,10%	22,37%
38	KBPR EKU	14,00%	15,70%	16,20%	15,30%
39	PT. NMB	11,90%	13,00%	17,10%	14,00%
40	PT. BPR SWA	23,90%	20,80%	28,70%	24,47%
41	PT. BPR NSI	14,00%	14,20%	14,90%	14,37%
42	PT BPR RBN	19,00%	25,90%	25,20%	23,37%
43	PT. BPR BIM	13,00%	14,20%	15,90%	14,37%
44	KBPR TMM	34,50%	25,30%	32,40%	30,73%
45	PT. BPR PJR	26,70%	18,20%	19,20%	21,37%
46	PT. BPR PHL	24,20%	30,40%	26,90%	27,17%
47	PT BPR YKJ	19,20%	5,60%	9,60%	11,47%
48	PT. BPR BAG	25,70%	24,40%	29,10%	26,40%
49	PT. BPR BHP	38,00%	38,50%	30,90%	35,80%
50	PT. BPR BBM	20,90%	22,20%	22,50%	21,87%
RATA-RATA PER TAHUN		30,53%	26,54%	24,70%	

TABULASI DATA

RASIO PPAP/PPAPWD BPR SAMPEL DI JAWA TIMUR

NO.	NAMA BPR	PPAP/PPAPWD			RATA-RATA
		1999	2000	2001	
1	PT. BPR DNM	637,00%	271,00%	359,00%	422,33%
2	PT. BPR JLT	14,10%	17,40%	28,00%	19,83%
3	KBPR BTY	61,20%	62,70%	35,70%	53,20%
4	PT. BPR AWS	157,00%	137,60%	264,80%	186,47%
5	PT. BPR SDB	63,00%	31,40%	70,20%	54,87%
6	PT. BPR TDN	245,10%	70,80%	63,10%	126,33%
7	PT. BPR DMM	201,00%	254,40%	318,90%	258,10%
8	PT. BPR SDT	-13,40%	108,90%	81,10%	67,80%
9	PT. BPR WDP	600,00%	419,60%	323,20%	447,60%
10	PT. BPR ADS	38,70%	80,30%	64,60%	61,20%
11	PT. BPR AHP	730,60%	572,80%	255,80%	519,73%
12	KBPR BMA	45,60%	44,10%	58,50%	49,40%
13	PT. BPR SSD	137,30%	122,00%	368,60%	209,30%
14	PT. BPR GNR	39,20%	34,70%	23,20%	32,37%
15	PT. BPR ASP	36,80%	45,20%	80,60%	54,20%
16	PT. BPR DNL	42,90%	34,30%	0,90%	26,03%
17	PT. BPR SMP	22,80%	4,80%	7,30%	11,63%
18	PT. BPR BMR	121,10%	99,40%	49,10%	89,87%
19	KBPR KMD	54,50%	65,60%	111,80%	77,30%
20	PT. BPRS DAM	73,00%	50,00%	50,00%	57,67%
21	PT. BRJ	15,00%	0,00%	23,70%	12,90%
22	PT. BPR DKM	46,60%	46,90%	122,80%	72,10%
23	PT. BPR APW	215,20%	14,60%	100,10%	109,97%
24	PT. BPR SMS	44,00%	95,30%	112,70%	84,00%
25	PT. BPR BRJ	29,30%	34,10%	89,50%	50,97%
26	KBPR JTS	0,20%	3,00%	27,50%	10,23%
27	KBPR TKR	167,80%	122,20%	41,30%	110,43%
28	KBPR ANG	2,70%	13,40%	40,50%	18,87%
29	PT. BPR HNM	2,70%	27,50%	14,80%	15,00%
30	PT. BPR TJT	71,40%	78,20%	76,20%	75,27%
31	KBPR KST	44,70%	12,20%	13,60%	23,50%
32	PT BPR EDB	12,90%	21,90%	125,50%	53,43%
33	KBPR AKC	17,20%	30,50%	61,00%	36,23%
34	PT. BPR NNA	65,70%	101,60%	61,50%	76,27%
35	PT. BPR SAY	29,70%	26,40%	32,80%	29,63%
36	PT BPR KSA	120,20%	148,60%	196,30%	155,03%
37	KBPR ANW	92,80%	72,50%	299,80%	155,03%
38	KBPR EKU	10,60%	16,20%	119,90%	48,90%
39	PT. NMB	21,30%	22,90%	11,30%	18,50%
40	PT. BPR SWA	123,40%	25,60%	39,80%	62,93%
41	PT. BPR NSI	7,20%	4,80%	82,50%	31,50%
42	PT BPR RBN	9,10%	18,30%	84,80%	37,40%
43	PT. BPR BIM	17,90%	146,80%	107,90%	90,87%
44	KBPR TMM	14,10%	16,80%	27,90%	19,60%
45	PT. BPR PJR	8,00%	25,00%	111,80%	48,27%
46	PT. BPR PHL	39,30%	34,70%	337,60%	137,20%
47	PT BPR YKJ	43,70%	77,80%	106,90%	76,13%
48	PT. BPR BAG	58,20%	23,00%	57,80%	46,33%
49	PT. BPR BHP	0,90%	2,30%	21,00%	8,07%
50	PT. BPR BBM	11,30%	75,90%	184,30%	90,50%
RATA-RATA PER TAHUN		93,55%	77,32%	106,95%	

TABULASI DATA
ROA BPR SAMPEL DI JAWA TIMUR

NO	NAMA BPR	ROA			RATA-RATA
		1999	2000	2001	
1	PT. BPR DNM	1,80%	3,40%	5,63%	3,61%
2	PT. BPR JLT	3,50%	1,60%	2,39%	2,50%
3	KBPR BTY	5,40%	7,60%	5,34%	6,11%
4	PT. BPR AWS	9,20%	2,40%	2,40%	4,67%
5	PT. BPR SDB	1,00%	2,20%	2,67%	1,96%
6	PT. BPR TDN	8,60%	6,10%	7,04%	7,25%
7	PT. BPR DMM	2,70%	4,30%	4,99%	4,00%
8	PT. BPR SDT	3,80%	3,40%	4,29%	3,83%
9	PT. BPR WDP	3,80%	4,90%	6,00%	4,90%
10	PT. BPR ADS	1,90%	7,10%	6,73%	5,24%
11	PT. BPR AHP	6,20%	5,30%	4,62%	5,37%
12	KBPR BMA	9,90%	4,10%	3,34%	5,78%
13	PT. BPR SSD	4,00%	3,80%	2,68%	3,49%
14	PT. BPR GNR	4,30%	4,20%	4,56%	4,35%
15	PT. BPR ASP	3,80%	5,00%	5,00%	4,60%
16	PT. BPR DNL	4,60%	3,60%	4,87%	4,36%
17	PT. BPR SMP	0,40%	2,90%	2,66%	1,99%
18	PT. BPR BMR	14,80%	4,70%	6,64%	8,71%
19	KBPR KMD	3,30%	8,80%	6,51%	6,20%
20	PT. BPRS DAM	2,20%	1,40%	2,42%	2,01%
21	PT. BRJ	3,40%	3,40%	2,70%	3,17%
22	PT. BPR DKM	5,70%	6,80%	6,85%	6,45%
23	PT. BPR APW	7,60%	9,40%	6,82%	7,94%
24	PT. BPR SMS	0,70%	6,00%	7,29%	4,66%
25	PT. BPR BRJ	2,00%	6,40%	5,73%	4,71%
26	KBPR JTS	2,20%	1,70%	3,75%	2,55%
27	KBPR TKR	6,30%	6,00%	5,89%	6,06%
28	KBPR ANG	1,70%	3,70%	5,29%	3,56%
29	PT. BPR HNM	6,60%	3,80%	5,39%	5,26%
30	PT. BPR TJT	3,00%	3,00%	3,04%	3,01%
31	KBPR KST	6,50%	5,00%	5,06%	5,52%
32	PT BPR EDB	4,70%	4,90%	3,39%	4,33%
33	KBPR AKC	5,10%	6,00%	6,01%	5,70%
34	PT. BPR NNA	7,50%	7,60%	6,69%	7,26%
35	PT. BPR SAY	0,60%	5,00%	4,55%	3,38%
36	PT BPR KSA	7,70%	6,70%	4,47%	6,29%
37	KBPR ANW	4,00%	3,40%	4,21%	3,87%
38	KBPR EKU	2,90%	5,10%	5,42%	4,47%
39	PT. NMB	3,00%	3,90%	4,23%	3,71%
40	PT. BPR SWA	6,60%	10,30%	6,46%	7,79%
41	PT. BPR NSI	-3,40%	4,00%	4,03%	1,54%
42	PT BPR RBN	1,60%	2,80%	2,48%	2,29%
43	PT. BPR BIM	6,80%	7,90%	9,28%	7,99%
44	KBPR TMM	2,40%	5,80%	5,01%	4,40%
45	PT. BPR PJR	1,30%	3,40%	6,14%	3,61%
46	PT. BPR PHL	5,70%	8,60%	4,97%	6,42%
47	PT BPR YKJ	-1,20%	0,20%	1,82%	0,27%
48	PT. BPR BAG	3,60%	2,60%	3,61%	3,27%
49	PT. BPR BHP	8,60%	10,40%	6,46%	8,49%
50	PT. BPR BBM	3,00%	4,90%	6,24%	4,71%
RATA-RATA PER TAHUN		4,23%	4,91%	4,88%	

TABULASI DATA
RASIO BOPO BPR SAMPEL DI JAWA TIMUR

NO	NAMA BPR	BOPO			RATA-RATA
		1999	2000	2001	
1	PT. BPR DNM	89,10%	82,00%	75,10%	82,07%
2	PT. BPR JLT	86,00%	90,60%	87,60%	88,07%
3	KBPR BTY	78,00%	72,70%	74,90%	75,20%
4	PT. BPR AWS	70,00%	83,10%	88,40%	80,50%
5	PT. BPR SDB	96,70%	89,70%	88,20%	91,53%
6	PT. BPR TDN	68,90%	70,40%	74,20%	71,17%
7	PT. BPR DMM	85,80%	77,30%	74,30%	79,13%
8	PT. BPR SDT	80,70%	82,80%	81,40%	81,63%
9	PT. BPR WDP	84,20%	72,60%	73,00%	76,60%
10	PT. BPR ADS	91,20%	56,90%	66,10%	71,40%
11	PT. BPR AHP	83,10%	86,50%	81,80%	83,80%
12	KBPR BMA	60,00%	73,00%	76,90%	69,97%
13	PT. BPR SSD	83,70%	87,80%	91,00%	87,50%
14	PT. BPR GNR	84,70%	83,80%	81,80%	83,43%
15	PT. BPR ASP	88,90%	83,10%	84,00%	85,33%
16	PT. BPR DNL	89,50%	81,50%	80,00%	83,67%
17	PT. BPR SMP	98,80%	90,70%	89,00%	92,83%
18	PT. BPR BMR	53,50%	82,70%	76,80%	71,00%
19	KBPR KMD	95,70%	58,90%	67,70%	74,10%
20	PT. BPRS DAM	86,90%	93,50%	92,00%	90,80%
21	PT. BRJ	86,70%	85,90%	85,90%	86,17%
22	PT. BPR DKM	82,30%	66,20%	71,00%	73,17%
23	PT. BPR APW	70,60%	70,30%	75,80%	72,23%
24	PT. BPR SMS	99,00%	73,90%	68,70%	80,53%
25	PT. BPR BRJ	93,10%	78,00%	85,00%	85,37%
26	KBPR JTS	88,20%	99,00%	76,10%	87,77%
27	KBPR TKR	78,60%	74,50%	78,40%	77,17%
28	KBPR ANG	100,50%	83,30%	81,60%	88,47%
29	PT. BPR HNM	62,70%	76,50%	74,20%	71,13%
30	PT. BPR TJT	91,70%	89,90%	89,50%	90,37%
31	KBPR KST	74,80%	77,50%	80,30%	77,53%
32	PT BPR EDB	86,20%	86,00%	87,10%	86,43%
33	KBPR AKC	77,20%	68,00%	70,30%	71,83%
34	PT. BPR NNA	73,20%	67,10%	66,80%	69,03%
35	PT. BPR SAY	97,40%	77,40%	78,50%	84,43%
36	PT BPR KSA	80,20%	83,90%	89,60%	84,57%
37	KBPR ANW	87,00%	83,70%	83,50%	84,73%
38	KBPR EKU	88,60%	81,30%	79,60%	83,17%
39	PT. NMB	87,70%	81,70%	91,40%	86,93%
40	PT. BPR SWA	76,60%	60,00%	72,20%	69,60%
41	PT. BPR NSI	112,80%	88,80%	82,40%	94,67%
42	PT BPR RBN	93,40%	91,30%	89,60%	91,43%
43	PT. BPR BIM	76,50%	67,80%	62,50%	68,93%
44	KBPR TMM	85,70%	80,20%	85,40%	83,77%
45	PT. BPR PJR	96,20%	86,10%	83,10%	88,47%
46	PT. BPR PHL	80,40%	69,20%	75,20%	74,93%
47	PT BPR YKJ	101,30%	98,50%	91,20%	97,00%
48	PT. BPR BAG	90,40%	91,30%	87,80%	89,83%
49	PT. BPR BHP	78,00%	69,50%	75,20%	74,23%
50	PT. BPR BBM	91,40%	83,40%	70,50%	81,77%
RATA-RATA PER TAHUN		84,88%	79,80%	79,85%	

TABULASI DATA
QUICK RATIO BPR SAMPEL DI JAWA TIMUR

NO	NAMA BPR	QR			RATA-RATA
		1999	2000	2001	
1	PT. BPR DNM	88,70%	35,90%	35,96%	53,52%
2	PT. BPR JLT	50,90%	28,30%	30,19%	36,46%
3	KBPR BTY	27,40%	20,40%	37,86%	28,55%
4	PT. BPR AWS	69,40%	3,00%	47,91%	40,10%
5	PT. BPR SDB	13,60%	6,50%	12,90%	11,00%
6	PT. BPR TDN	15,10%	81,90%	80,55%	59,18%
7	PT. BPR DMM	17,30%	28,60%	58,62%	34,84%
8	PT. BPR SDT	21,40%	57,80%	23,85%	34,35%
9	PT. BPR WDP	43,60%	17,10%	34,61%	31,77%
10	PT. BPR ADS	47,80%	16,30%	35,29%	33,13%
11	PT. BPR AHP	51,00%	23,40%	10,43%	28,28%
12	KBPR BMA	10,90%	15,20%	5,43%	10,51%
13	PT. BPR SSD	70,20%	500,80%	32,27%	201,09%
14	PT. BPR GNR	24,70%	7,00%	3,56%	11,75%
15	PT. BPR ASP	8,30%	15,50%	10,31%	11,37%
16	PT. BPR DNL	19,20%	35,40%	24,91%	26,50%
17	PT. BPR SMP	14,40%	14,00%	20,22%	16,21%
18	PT. BPR BMR	20,60%	15,20%	18,68%	18,16%
19	KBPR KMD	49,20%	34,70%	52,81%	45,57%
20	PT. BPRS DAM	36,20%	35,90%	20,91%	31,00%
21	PT. BRJ	44,00%	5,60%	17,81%	22,47%
22	PT. BPR DKM	21,00%	8,60%	13,16%	14,25%
23	PT. BPR APW	13,90%	17,40%	29,63%	20,31%
24	PT. BPR SMS	38,60%	25,20%	2,00%	21,93%
25	PT. BPR BRJ	39,90%	13,30%	12,56%	21,92%
26	KBPR JTS	42,20%	74,30%	43,12%	53,21%
27	KBPR TKR	14,30%	37,10%	43,14%	31,51%
28	KBPR ANG	22,30%	10,90%	19,44%	17,55%
29	PT. BPR HNM	33,10%	12,00%	30,68%	25,26%
30	PT. BPR TJT	5,00%	4,10%	6,30%	5,13%
31	KBPR KST	33,60%	52,50%	42,03%	42,71%
32	PT BPR EDB	43,10%	26,40%	40,52%	36,67%
33	KBPR AKC	31,70%	41,20%	42,53%	38,48%
34	PT. BPR NNA	24,70%	9,00%	17,75%	17,15%
35	PT. BPR SAY	47,60%	9,50%	22,77%	26,62%
36	PT BPR KSA	18,10%	9,40%	4,13%	10,54%
37	KBPR ANW	24,10%	33,50%	54,19%	37,26%
38	KBPR EKU	2,50%	7,80%	8,87%	6,39%
39	PT. NMB	12,30%	15,60%	20,64%	16,18%
40	PT. BPR SWA	30,50%	24,00%	31,38%	28,63%
41	PT. BPR NSI	8,90%	11,10%	14,87%	11,62%
42	PT BPR RBN	30,50%	29,30%	37,56%	32,45%
43	PT. BPR BIM	8,90%	5,90%	13,33%	9,38%
44	KBPR TMM	13,90%	29,60%	47,17%	30,22%
45	PT. BPR PJR	26,50%	19,70%	21,40%	22,53%
46	PT. BPR PHL	5,10%	23,60%	36,30%	21,67%
47	PT BPR YKJ	13,30%	19,40%	17,18%	16,63%
48	PT. BPR BAG	13,00%	40,70%	5,25%	19,65%
49	PT. BPR BHP	24,70%	30,50%	41,49%	32,23%
50	PT. BPR BBM	4,80%	8,40%	27,00%	13,40%
RATA-RATA PER TAHUN		27,84%	32,97%	27,23%	

TABULASI DATA

LDR BPR SAMPEL DI JAWA TIMUR

NO	NAMA BPR	LDR			RATA-RATA
		1999	2000	2001	
1	PT. BPR DNM	37,20%	70,80%	77,30%	61,77%
2	PT. BPR JLT	64,20%	79,60%	79,40%	74,40%
3	KBPR BTY	84,60%	88,40%	77,30%	83,43%
4	PT. BPR AWS	58,90%	97,30%	73,30%	76,50%
5	PT. BPR SDB	64,40%	74,40%	81,10%	73,30%
6	PT. BPR TDN	82,70%	75,60%	68,60%	75,63%
7	PT. BPR DMM	86,60%	78,10%	69,60%	78,10%
8	PT. BPR SDT	78,90%	68,20%	85,40%	77,50%
9	PT. BPR WDP	68,30%	88,30%	76,90%	77,83%
10	PT. BPR ADS	72,50%	89,60%	76,40%	79,50%
11	PT. BPR AHP	71,30%	86,10%	86,90%	81,43%
12	KBPR BMA	91,20%	93,30%	97,40%	93,97%
13	PT. BPR SSD	59,10%	68,60%	88,30%	72,00%
14	PT. BPR GNR	88,10%	92,00%	89,30%	89,80%
15	PT. BPR ASP	58,60%	69,30%	84,10%	70,67%
16	PT. BPR DNL	82,70%	76,30%	80,10%	79,70%
17	PT. BPR SMP	87,90%	85,50%	78,20%	83,87%
18	PT. BPR BMR	89,00%	93,60%	91,30%	91,30%
19	KBPR KMD	63,10%	69,90%	79,10%	70,70%
20	PT. BPRS DAM	72,60%	81,20%	83,80%	79,20%
21	PT. BRJ	58,20%	92,30%	87,50%	79,33%
22	PT. BPR DKM	73,70%	89,90%	85,00%	82,87%
23	PT. BPR APW	82,10%	79,40%	77,50%	79,67%
24	PT. BPR SMS	49,30%	73,80%	90,80%	71,30%
25	PT. BPR BRJ	79,10%	97,10%	93,80%	90,00%
26	KBPR JTS	60,60%	47,50%	72,50%	60,20%
27	KBPR TKR	91,80%	86,50%	78,70%	85,67%
28	KBPR ANG	69,50%	87,50%	84,00%	80,33%
29	PT. BPR HNM	75,70%	89,50%	74,10%	79,77%
30	PT. BPR TJT	98,90%	98,70%	95,50%	97,70%
31	KBPR KST	83,30%	75,90%	73,90%	77,70%
32	PT BPR EDB	67,00%	76,60%	67,50%	70,37%
33	KBPR AKC	71,40%	75,90%	77,30%	74,87%
34	PT. BPR NNA	73,20%	83,30%	79,60%	78,70%
35	PT. BPR SAY	57,20%	85,20%	82,80%	75,07%
36	PT BPR KSA	93,30%	74,60%	83,40%	83,77%
37	KBPR ANW	75,80%	73,70%	64,60%	71,37%
38	KBPR EKU	88,10%	87,30%	92,20%	89,20%
39	PT. NMB	81,10%	82,70%	76,70%	80,17%
40	PT. BPR SWA	78,10%	87,90%	80,30%	82,10%
41	PT. BPR NSI	74,30%	83,40%	86,60%	81,43%
42	PT BPR RBN	64,20%	66,70%	68,30%	66,40%
43	PT. BPR BIM	89,80%	91,10%	80,50%	87,13%
44	KBPR TMM	87,70%	75,20%	72,50%	78,47%
45	PT. BPR PJR	71,50%	78,00%	77,70%	75,73%
46	PT. BPR PHL	96,80%	87,10%	89,20%	91,03%
47	PT BPR YKJ	76,30%	80,10%	80,40%	78,93%
48	PT. BPR BAG	83,80%	62,60%	86,70%	77,70%
49	PT. BPR BHP	74,40%	79,90%	77,40%	77,23%
50	PT. BPR BBM	99,50%	87,90%	82,10%	89,83%
RATA-RATA PER TAHUN		75,75%	81,27%	80,86%	

TABULASI DATA GABUNGAN

No	Tingkat Kesehatan	CAR	KAP	PPAP/PPAPWD	ROA	BOPO	LDR	QR
1	95,27	64,60%	0,61%	422,33%	3,61%	82,07%	61,77%	53,52%
2	94,58	47,77%	5,36%	19,83%	2,50%	88,07%	74,40%	36,46%
3	95,53	29,83%	5,42%	53,20%	6,11%	75,20%	83,43%	28,55%
4	93,80	50,67%	1,20%	186,47%	4,67%	80,50%	76,50%	40,10%
5	89,54	19,37%	3,96%	54,87%	1,96%	91,53%	73,30%	11,00%
6	92,54	37,87%	1,37%	126,33%	7,25%	71,17%	75,63%	59,18%
7	96,87	29,73%	0,83%	258,10%	4,00%	79,13%	78,10%	34,84%
8	91,53	29,57%	4,34%	67,80%	3,83%	81,63%	77,50%	34,35%
9	98,76	28,30%	0,01%	447,60%	4,90%	76,60%	77,83%	31,77%
10	90,59	38,00%	9,08%	61,20%	5,24%	71,40%	79,50%	33,13%
11	96,00	34,10%	0,61%	519,73%	5,37%	83,80%	81,43%	28,28%
12	91,54	24,13%	4,03%	49,40%	5,78%	69,97%	93,97%	10,51%
13	95,00	42,60%	1,84%	209,30%	3,49%	87,50%	72,00%	201,09%
14	92,44	22,40%	5,04%	32,37%	4,35%	83,43%	89,80%	11,75%
15	93,80	20,63%	5,72%	54,20%	4,60%	85,33%	70,67%	11,37%
16	89,96	23,60%	7,25%	26,03%	4,36%	83,67%	79,70%	26,50%
17	81,87	16,60%	11,23%	11,63%	1,99%	92,83%	83,87%	16,21%
18	93,30	20,20%	3,97%	89,87%	8,71%	71,00%	91,30%	18,16%
19	92,26	36,30%	6,00%	77,30%	6,20%	74,10%	70,70%	45,57%
20	87,63	20,50%	5,98%	57,67%	2,01%	90,80%	79,20%	31,00%
21	88,12	28,13%	13,30%	12,90%	3,17%	86,17%	79,33%	22,47%
22	92,08	18,87%	6,62%	72,10%	6,45%	73,17%	82,87%	14,25%
23	97,13	24,20%	3,28%	109,97%	7,94%	72,23%	79,67%	20,31%
24	91,07	28,23%	5,24%	84,00%	4,66%	80,53%	71,30%	21,93%
25	83,53	38,10%	6,95%	50,97%	4,71%	85,37%	90,00%	21,92%
26	86,26	33,70%	8,71%	10,23%	2,55%	87,77%	60,20%	53,21%
27	90,83	29,13%	5,15%	110,43%	6,06%	77,17%	85,67%	31,51%
28	84,96	20,53%	8,62%	18,87%	3,56%	88,47%	80,33%	17,55%
29	93,26	21,90%	5,74%	15,00%	5,26%	71,13%	79,77%	25,26%
30	84,27	15,23%	9,33%	75,27%	3,01%	90,37%	97,70%	5,13%
31	91,35	26,27%	5,74%	23,50%	5,52%	77,53%	77,70%	42,71%
32	94,73	18,97%	2,95%	53,43%	4,33%	86,43%	70,37%	36,67%
33	92,33	19,83%	2,79%	36,23%	5,70%	71,83%	74,87%	38,48%
34	95,24	32,27%	1,08%	76,27%	7,26%	69,03%	78,70%	17,15%
35	85,61	30,87%	3,24%	29,63%	3,38%	84,43%	75,07%	26,62%
36	90,09	36,90%	3,63%	155,03%	6,29%	84,57%	83,77%	10,54%
37	96,87	22,37%	0,80%	155,03%	3,87%	84,73%	71,37%	37,26%
38	88,00	15,30%	6,93%	48,90%	4,47%	83,17%	89,20%	6,39%
39	89,48	14,00%	6,58%	18,50%	3,71%	86,93%	80,17%	16,18%
40	92,54	24,47%	5,25%	62,93%	7,79%	69,60%	82,10%	28,63%
41	84,39	14,37%	8,23%	31,50%	1,54%	94,67%	81,43%	11,62%
42	95,64	23,37%	2,80%	37,40%	2,29%	91,43%	66,40%	32,45%
43	93,26	14,37%	1,27%	90,87%	7,99%	68,93%	87,13%	9,38%
44	91,75	30,73%	11,00%	19,60%	4,40%	83,77%	78,47%	30,22%
45	96,95	21,37%	4,57%	48,27%	3,61%	88,47%	75,73%	22,53%
46	93,62	27,17%	2,33%	137,20%	6,42%	74,93%	91,03%	21,67%
47	79,49	11,47%	2,00%	76,13%	0,27%	97,00%	78,93%	16,63%
48	91,18	26,40%	2,17%	46,33%	3,27%	89,83%	77,70%	19,65%
49	89,39	35,80%	9,67%	8,07%	8,49%	74,23%	77,23%	32,23%
50	90,73	21,87%	4,02%	90,50%	4,71%	81,77%	89,83%	13,40%

Lampiran 10

Regression (Enter)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
TKS	.9138	4.299E-02	50
CAR	.2724	.1037	50
KAP	4.880E-02	3.108E-02	50
PPAP	.9258	1.0885	50
ROA	4.640E-02	1.903E-02	50
BOPO	.8152	7.664E-02	50
LDR	.7930	7.667E-02	50
QR	.2936	.2778	50

Correlations

	TKS	CAR	KAP	PPAP	ROA	BOPO	LDR	QR	
Pearson Correlation	TKS	1.000	.316	-.566	.462	.424	-.473	-.242	.247
	CAR	.316	1.000	-.200	.430	.107	-.160	-.389	.474
	KAP	-.566	-.200	1.000	-.586	-.177	.221	.143	-.207
	PPAP	.462	.430	-.586	1.000	.099	-.092	-.121	.249
	ROA	.424	.107	-.177	.099	1.000	-.885	.283	-.083
	BOPO	-.473	-.160	.221	-.092	-.885	1.000	-.225	.029
	LDR	-.242	-.389	.143	-.121	.283	-.225	1.000	-.413
	QR	.247	.474	-.207	.249	-.083	.029	-.413	1.000
Sig. (1-tailed)	TKS	.	.013	.000	.000	.001	.000	.045	.042
	CAR	.013	.	.082	.001	.230	.133	.003	.000
	KAP	.000	.082	.	.000	.110	.061	.161	.075
	PPAP	.000	.001	.000	.	.248	.262	.202	.040
	ROA	.001	.230	.110	.248	.	.000	.023	.283
	BOPO	.000	.133	.061	.262	.000	.	.058	.420
	LDR	.045	.003	.161	.202	.023	.058	.	.001
	QR	.042	.000	.075	.040	.283	.420	.001	.
N	TKS	50	50	50	50	50	50	50	50
	CAR	50	50	50	50	50	50	50	50
	KAP	50	50	50	50	50	50	50	50
	PPAP	50	50	50	50	50	50	50	50
	ROA	50	50	50	50	50	50	50	50
	BOPO	50	50	50	50	50	50	50	50
	LDR	50	50	50	50	50	50	50	50
	QR	50	50	50	50	50	50	50	50

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	QR, BOPO, PPAP, LDR, KAP, CAR, ROA ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: TKS

Lampiran 11

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.745 ^a	.554	.480	3.100E-02	.554	7.462	7	42	.000	1.865

a. Predictors: (Constant), QR, BOPO, PPAP, LDR, KAP, CAR, ROA

b. Dependent Variable: TKS

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.021E-02	7	7.173E-03	7.462	.000 ^a
	Residual	.037E-02	42	9.612E-04		
	Total	.058E-02	49			

a. Predictors: (Constant), QR, BOPO, PPAP, LDR, KAP, CAR, ROA

b. Dependent Variable: TKS

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	% Confidence Interval for		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.186	.141		8.443	.000	.903	1.470		
	CAR	.61E-02	.057	-.039	-.283	.779	-.131	.099	.566	1.767
	KAP	-.417	.186	-.301	-2.240	.030	-.792	-.041	.587	1.704
	PPAP	247E-03	.006	.209	1.475	.148	-.003	.020	.530	1.887
	ROA	.339	.511	.150	.663	.511	-.693	1.371	.207	4.830
	BOPO	-.183	.128	-.326	-1.428	.161	-.441	.075	.204	4.895
	LDR	-.158	.070	-.281	-2.240	.030	-.299	-.016	.675	1.482
	QR	321E-03	.019	.057	.462	.646	-.030	.047	.699	1.431

a. Dependent Variable: TKS

Lampiran 12

Collinearity Diagnostics

Mod	Dimensi	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions							
				Constant	CAR	KAP	PPAP	ROA	BOPO	LDR	QR
1	1	6.526	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.761	2.928	.00	.00	.07	.21	.00	.00	.00	.04
	3	.391	4.086	.00	.00	.00	.13	.00	.00	.00	.61
	4	.163	6.319	.00	.00	.29	.28	.10	.00	.00	.01
	5	3E-02	8.860	.00	.06	.49	.11	.06	.01	.01	.00
	6	97E-02	9.657	.00	.77	.12	.23	.02	.00	.00	.27
	7	55E-03	37.444	.01	.09	.00	.01	.17	.09	.88	.04
	8	71E-04	01.208	.98	.07	.03	.03	.64	.91	.11	.01

a. Dependent Variable: TKS

Residuals Statistics

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	.8445	.9775	.9138	3.201E-02	50
Residual	.24E-02	874E-02	104E-17	2.870E-02	50
Std. Predicted Value	-2.165	1.989	.000	1.000	50
Std. Residual	-2.981	2.217	.000	.926	50

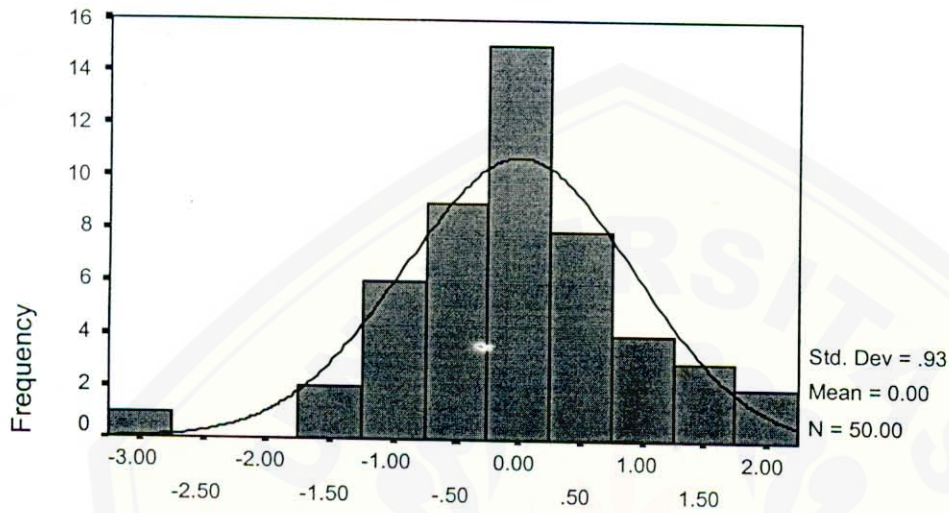
a. Dependent Variable: TKS

Lampiran 13

Charts

Histogram

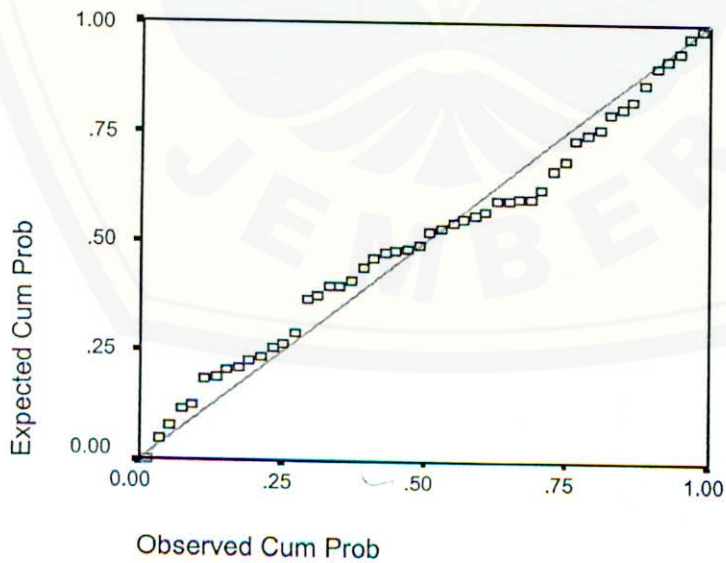
Dependent Variable: TKS



Regression Standardized Residual

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residuals

Dependent Variable: TKS



Lampiran 14

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-1.22236E-10
	Std. Deviation	2.870293E-02
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.090
	Negative	-.080
Kolmogorov-Smirnov Z		.637
Asymp. Sig. (2-tailed)		.812

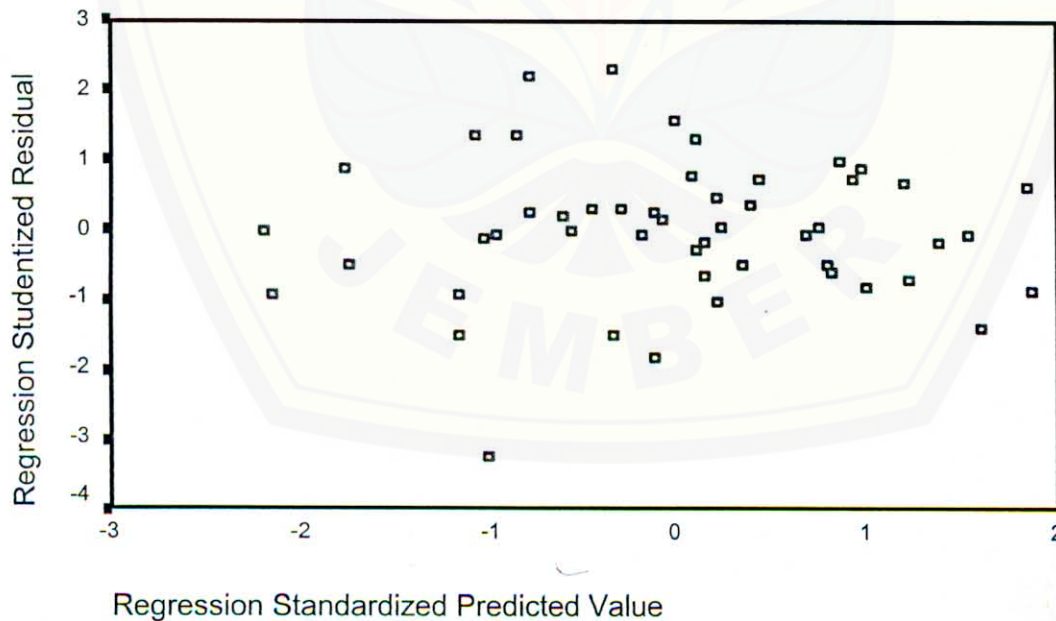
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji heteroskedastik

Scatterplot

Dependent Variable: TKS



Lampiran 15

Regression (Stepwise)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
TKS	.9138	4.299E-02	50
CAR	.2724	.1037	50
KAP	4.880E-02	3.108E-02	50
PPAP	.9258	1.0885	50
ROA	4.640E-02	1.903E-02	50
BOPO	.8152	7.664E-02	50
LDR	.7930	7.667E-02	50
QR	.2936	.2778	50

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KAP		Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
2	BOPO		Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
3	LDR		Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

a. Dependent Variable: TKS

Lampiran 16

Model Summary^d

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.566 ^a	.321	.306	3.581E-02	.321	22.650	1	48	.000	1.801
2	.669 ^b	.448	.424	3.262E-02	.127	10.830	1	47	.002	
3	.721 ^c	.519	.488	3.077E-02	.071	6.833	1	46	.012	

a. Predictors: (Constant), KAP

b. Predictors: (Constant), KAP, BOPO

c. Predictors: (Constant), KAP, BOPO, LDR

d. Dependent Variable: TKS

ANOVA^d

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.904E-02	1	2.904E-02	22.650	.000 ^a
	Residual	6.154E-02	48	1.282E-03		
	Total	9.058E-02	49			
2	Regression	4.056E-02	2	2.028E-02	19.059	.000 ^b
	Residual	5.002E-02	47	1.064E-03		
	Total	9.058E-02	49			
3	Regression	4.703E-02	3	1.568E-02	16.560	.000 ^c
	Residual	4.355E-02	46	9.467E-04		
	Total	9.058E-02	49			

a. Predictors: (Constant), KAP

b. Predictors: (Constant), KAP, BOPO

c. Predictors: (Constant), KAP, BOPO, LDR

d. Dependent Variable: TKS

Coefficients^d

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.952	.009		100.267	.000	.933	.971	1.000	1.000
	KAP	-.783	.165	-.566	-4.759	.000	-1.114	-.452		
2	(Constant)	1.114	.050		22.312	.000	1.013	1.214	.951	1.051
	KAP	-.671	.154	-.485	-4.367	.000	-.981	-.362		
	BOPO	-.205	.062	-.366	-3.291	.002	-.331	-.080		
3	(Constant)	1.269	.076		16.740	.000	1.117	1.422	.912	1.097
	KAP	-.593	.148	-.429	-4.003	.000	-.891	-.295		
	BOPO	-.248	.061	-.441	-4.059	.000	-.370	-.125		
	LDR	-.157	.060	-.280	-2.614	.012	-.278	-.036		

a. Dependent Variable: TKS

Lampiran 17

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	KAP	BOPO	LDR
1	1	1.846	1.000	.08	.08		
	2	.154	3.461	.92	.92		
2	1	2.798	1.000	.00	.03	.00	
	2	.197	3.765	.01	.95	.01	
	3	4.205E-03	25.796	.99	.02	.99	
3	1	3.769	1.000	.00	.02	.00	.00
	2	.218	4.155	.00	.93	.00	.00
	3	1.080E-02	18.681	.00	.00	.34	.39
	4	2.161E-03	41.762	1.00	.06	.65	.61

a. Dependent Variable: TKS

Casewise Diagnostics^a

Case Number	Std. Residual	TKS
47	-3.348	.79

a. Dependent Variable: TKS

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	.8390	.9683	.9138	3.098E-02	50
Residual	-.1030	6.777E-02	-5.33E-17	2.981E-02	50
Std. Predicted Value	-2.414	1.758	.000	1.000	50
Std. Residual	-3.348	2.203	.000	.969	50

a. Dependent Variable: TKS

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
TKS	50	.79	.99	.9134	4.236E-02	1.795E-03
CAR	50	.11	.65	.2726	.1025	1.051E-02
KAP	50	.00	.13	4.877E-02	3.115E-02	9.702E-04
PPAP	50	.08	5.20	.9261	1.0885	1.185
ROA	50	.00	.09	4.673E-02	1.903E-02	3.622E-04
BOPO	50	.69	.97	.8151	7.649E-02	5.851E-03
LDR	50	.60	.98	.7929	7.636E-02	5.831E-03
QR	50	.05	2.01	.2935	.2779	7.720E-02
Valid N (listwise)	50					

Lampiran 18

Correlations

		TKS	CAR	KAP	PPAP	ROA	BOPO	LDR	QR
TKS	Pearson Correlation	1.000	.311	-.574	.466	.447	-.480	-.250	.248
	Sig. (2-tailed)		.028	.000	.001	.001	.000	.080	.082
	Sum of Squares and Cross-products	8.794E-02	6.614E-02	-3.713E-02	1.054	1.765E-02	-7.624E-02	-3.961E-02	.143
	Covariance	1.795E-03	1.350E-03	-7.577E-04	2.151E-02	3.602E-04	-1.556E-03	-8.083E-03	2.922E-03
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
CAR	Pearson Correlation	.311	1.000	-.209	.435	.126	-.168	-.395	.469
	Sig. (2-tailed)	.028		.146	.002	.385	.243	.005	.001
	Sum of Squares and Cross-products	6.614E-02	.515	-3.265E-02	2.379	1.201E-02	-6.459E-02	-.152	.655
	Covariance	1.350E-03	1.051E-02	-6.662E-04	4.855E-02	2.451E-04	-1.318E-03	-3.093E-03	1.337E-02
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
KAP	Pearson Correlation	-.574	-.209	1.000	-.602	-.176	.219	.175	-.213
	Sig. (2-tailed)	.000	.146		.000	.221	.126	.225	.137
	Sum of Squares and Cross-products	-3.713E-02	-3.265E-02	4.754E-02	-1.000	-5.119E-03	2.557E-02	2.036E-02	-9.050E-02
	Covariance	-7.577E-04	-6.662E-04	9.702E-04	-2.041E-02	-1.045E-04	5.219E-04	4.156E-04	-1.847E-03
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
PPAP	Pearson Correlation	.466	.435	-.602	1.000	.098	-.103	-.124	.249
	Sig. (2-tailed)	.001	.002	.000		.497	.478	.390	.082
	Sum of Squares and Cross-products	1.054	2.379	-1.000	58.060	9.985E-02	-.419	-.506	3.686
	Covariance	2.151E-02	4.855E-02	-2.041E-02	1.185	2.038E-03	-8.550E-03	-1.032E-02	7.522E-02
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
ROA	Pearson Correlation	.447	.126	-.176	.098	1.000	-.893	.293	-.056
	Sig. (2-tailed)	.001	.385	.221	.497		.000	.039	.697
	Sum of Squares and Cross-products	1.765E-02	1.201E-02	-5.119E-03	9.985E-02	1.775E-02	-6.368E-02	2.085E-02	-1.462E-02
	Covariance	3.602E-04	2.451E-04	-1.045E-04	2.038E-03	3.622E-04	-1.300E-03	4.256E-04	-2.984E-04
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
BOPO	Pearson Correlation	-.480	-.168	.219	-.103	-.893	1.000	-.211	.019
	N	50	50	50	50	50	50	50	50

	Sig. (2-tailed)	.000	.243	.126	.478	.000	.141	.896	
	Sum of Squares and Cross-products Covariance	-7.624E-02	-6.459E-02	2.557E-02	-.419	-6.368E-02	.287	-6.044E-02	1.973E-02
	N	50	50	50	50	50	50	50	
LDR	Pearson Correlation	-.250	-.395	.175	-.124	.293	-.211	1.000	-.417
	Sig. (2-tailed)	.080	.005	.225	.390	.039	.141	.003	
	Sum of Squares and Cross-products Covariance	-3.961E-02	-.152	2.036E-02	-.506	2.085E-02	-6.044E-02	.286	-.434
	N	50	50	50	50	50	50	50	
QR	Pearson Correlation	.248	.469	-.213	.249	-.056	.019	-.417	1.000
	Sig. (2-tailed)	.082	.001	.137	.082	.697	.896	.003	.
	Sum of Squares and Cross-products Covariance	.143	.655	-9.050E-02	3.686	-1.462E-02	1.973E-02	-.434	3.783
	N	50	50	50	50	50	50	50	

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(Perhitungan Uji Kesamaan Dua Koefisien Beta, Gujarati;147)

$$t = \frac{b_2 - b_5}{\sqrt{\text{Var}(b_2) + \text{Var}(b_5) - 2 \text{Cov}(b_2, b_5)}}$$

1. $b_2 - b_5$

$$t = \frac{-0,593 + 0,248}{\sqrt{0,000970 + 0,00585 - 2(0,0005219)}}$$

$$t = -51,339$$

Lampiran 20

2. $b_2 - b_6$

$$t = \frac{-0,593 + 0,157}{\sqrt{0,000970 + 0,00583 - 2(0,0203)}}$$

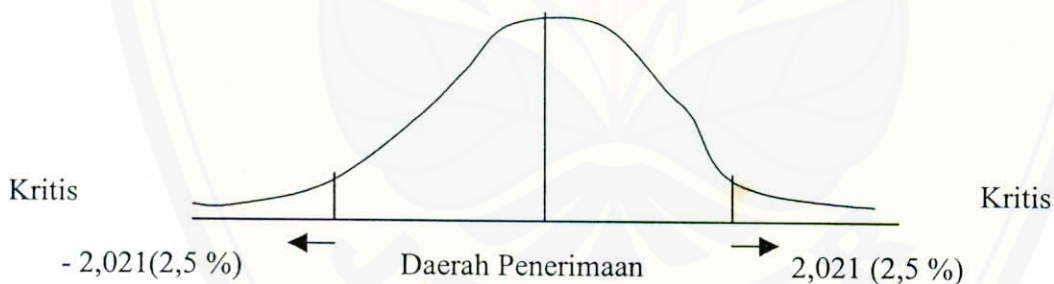
$$t = -2,372$$

3. $b_5 - b_6$

$$t = \frac{-0,248 + 0,157}{\sqrt{0,00585 + 0,00583 - 2(0,00123)}}$$

$$t = -9,489$$

Grafik Daerah Penerimaan dan Daerah Kritis ($\alpha = 0,05, n=50$, two-tail)



Terima Kasih

